

katalog : 2302002.34

INDIKATOR TINGKAT HIDUP PEKERJA/KARYAWAN

D.I. YOGYAKARTA

Agustus 2020-2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

INDIKATOR TINGKAT HIDUP PEKERJA/KARYAWAN

D.I. YOGYAKARTA

Agustus 2020-2021



Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2020–2021

*Indicators of Living Level of Employees Daerah Istimewa Yogyakarta
August 2020–2021*

ISSN : 2460-3171

No. Publikasi/Publication Number: 34000.2216

Katalog/Catalog: 2302002.34

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv + 120 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Penyunting/Editor:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Penerbit/Published by:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Pencetak/Printed by:

-

Sumber Ilustrasi/Graphics by: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for
commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*

TIM PENYUSUN BUKU

Pengarah : Sugeng Arianto
Penanggung Jawab : Soman Wisnu Darma
Editor : Nur Latifah Hanum
Naskah : Handani Murda
Pengolah Data : Handani Murda

<https://yogyakarta.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan D.I Yogyakarta Agustus 2020-2021 merupakan publikasi yang menggambarkan mengenai keadaan tingkat hidup pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta pada Agustus 2020-2021. Publikasi ini dilengkapi data seri tingkat hidup pekerja/karyawan sehingga terjaga kontinuitas dan keterbandingan antar waktu.

Data yang disajikan meliputi berbagai indikator yang mempengaruhi tingkat hidup pekerja/karyawan meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha utama, pendidikan pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan pasar tenaga kerja. Sumber data utama publikasi ini adalah data dasar hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020-2021. Selain itu juga dilengkapi dengan beberapa data sekunder yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta.

Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data dalam menjelaskan kondisi tingkat hidup pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan publikasi edisi berikutnya.

Yogyakarta, April 2022

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Kepala,



Sugeng Arianto, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INFOGRAFIK	1
ABSTRAKSI.....	5
I. PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Ruang Lingkup	20
1.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Publikasi	20
1.4. Sistematika Publikasi	21
II. METODOLOGI.....	23
2.1. Sumber Data	25
2.2. Konsep dan Definisi	27
III. HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS	33
3.1. Tenaga kerja.....	35
3.2. Pekerja/karyawan.....	40
3.3. Pekerja/karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha	50
3.4. Pekerja/karyawan menurut Pendidikan.....	57
3.5. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/karyawan	61
3.6. Upah Minimum.....	66
3.7. Pasar Tenaga Kerja	69

IV. PENUTUP.....	77
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Saran.....	82
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	117

<https://yogyakarta.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sejarah Sakernas 1976 – 2020	26
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)	44
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)	47
Tabel 3.3.	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I.Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen).....	52
Tabel 3.4.	Persentase Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)	55
Tabel 3.5.	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen).....	58
Tabel 3.6.	Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Sektor/Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (Rupiah).....	62
Tabel 3.7.	Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta, Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)	67
Tabel 3.8.	Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2020-2021 (orang)	72
Tabel 3.9.	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Asal Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (orang)	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan D.I Yogyakarta Tahun 2021 (Persen)	15
Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan berdasarkan <i>International Conference of Labour Statistician</i> (ICLS) ke 13.....	27
Gambar 3.1	Jumlah Angkatan Kerja D.I.Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (ribu orang).....	36
Gambar 3.2	Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, Agustus 2021.....	38
Gambar 3.3	Jumlah Pengangguran dan TPT di D.I.Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020 dan Agustus 2021	39
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)	42
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)	45
Gambar 3.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen).....	48
Gambar 3.7	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)	51
Gambar 3.8	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)	54

Gambar 3.9	Persentase Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021.....	56
Gambar 3.10	Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021 (persen)	60
Gambar 3.11	Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021 (Ribu Rupiah).....	63
Gambar 3.12	Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021 (Ribu Rupiah)	64
Gambar 3.13	Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta tahun 2021-2022 (Rupiah)	68
Gambar 3.14	Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2021 (orang)	71
Gambar 3.15	Pencari Kerja yang Terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (persen).....	73
Gambar 3.16	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 2019-2021 (orang).....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021	85
Lampiran 2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2021	86
Lampiran 3	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021.....	87
Lampiran 4	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2021	88
Lampiran 5	TKK dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021	89
Lampiran 6	TKK dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2021	90
Lampiran 7	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Sektor/Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2021	91
Lampiran 8	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Sektor/Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2021	92
Lampiran 9	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2021.....	93
Lampiran 10	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2021	94
Lampiran 11	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor/Lapangan Usaha, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2021.....	95

Lampiran 12	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor/Lapangan Usaha, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2021	96
Lampiran 13	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 2021.....	97
Lampiran 14	Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Kulon Progo, 2021.....	98
Lampiran 15	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2021	99
Lampiran 16	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Bantul, 2021	100
Lampiran 17	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul, 2021.....	101
Lampiran 18	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul, 2021.....	102
Lampiran 19	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2021.....	103
Lampiran 20	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Sleman, 2021	104
Lampiran 21	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta, 2021.....	105
Lampiran 22	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kota Yogyakarta, 2021	106

Lampiran 23	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021.....	107
Lampiran 24	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021.....	108
Lampiran 25	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin 2021.....	109
Lampiran 26	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2021	110
Lampiran 27	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kota Yogyakarta, 2021	111
Lampiran 28	Jumlah Pekerja/Karyawan Menurut Sektor Usaha, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2021.....	112
Lampiran 29	Jumlah Pekerja/Karyawan Menurut Sektor Usaha, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2021.....	113
Lampiran 30	Upah Minimum Provinsi Menurut Provinsi, 2021-2022	114

Penduduk Bekerja 15 Tahun ke Atas D.I Yogyakarta, Agustus 2021 3,18 Juta Jiwa atau Naik 1,37 Persen



Pertanian



4,45%

Industri



31,20%

Jasa



64,34%

Pengusaha



38,75%

Buruh/ Karyawan



47,86%

Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar



13,40%

RATA-RATA UPAH PEKERJA PER BULAN D.I YOGYAKARTA, AGUSTUS 2021 SEBESAR 2,14 JUTA



Rp. 1,89 juta Rp. 2,31 juta



Rp. 1,37 juta



Rp. 1,75 juta



Rp. 3,57 juta



Lapangan usaha



Pertanian

Rp. 1,20 juta



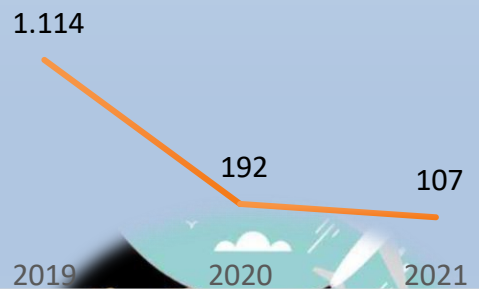
Industri

Rp. 1,84 juta

Jasa



Rp. 2,36 juta



ABSTRAK

Kondisi perekonomian D.I Yogyakarta pada awal tahun 2021 sudah mengarah perbaikan. Perekonomian D.I Yogyakarta Triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I tahun 2020 (y-on-y) tumbuh 5,74 persen dan pada triwulan II tahun 2021 bahkan meningkat dua kali lipat, yaitu menjadi 11,88 persen. Pemerintah kembali mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan D.I Yogyakarta pada Juli-Agustus 2021 diberlakukan PPKM Darurat Level 4. Kebijakan ini berdampak pada perekonomian D.I Yogyakarta pada triwulan III tahun 2021 yang mengalami keterpurukan, yaitu perekonomian hanya mampu tumbuh 2,31 persen. Kondisi ekonomi yang kurang membaik secara langsung berpengaruh terhadap rendahnya penawaran tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan TPT pada Agustus 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu pada Agustus 2021 sebesar 4,56 persen atau turun 0,01 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Dapat juga dikatakan bahwa TTK pada Agustus 2021 naik 0,01 persen poin dibandingkan Agustus 2020 atau menjadi 95,44 persen.

Sektor Jasa pada Agustus 2021 paling banyak menyerap pekerja/karyawan dengan kontribusi sebesar 64,34 persen. Terbanyak berikutnya diikuti Sektor Industri sebesar 31,20 persen dan paling sedikit Sektor Pertanian sebesar 4,46 persen. Dibandingkan Agustus 2020, Sektor Industri pada Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,43 persen poin. Sedangkan Sektor Pertanian maupun Sektor Jasa pada Agustus 2021 mengalami penurunan, yaitu secara berurutan turun sebesar 1,08 persen poin dan 0,36 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

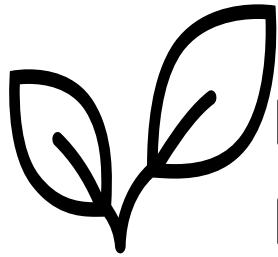
Kualitas pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta sudah cukup bagus. Pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 didominasi tingkat pendidikan SLTA ke atas sebanyak 73,02 persen dari seluruh pekerja/karyawan penerima upah. Sedangkan sisanya sebanyak 26,98 persen berpendidikan SLTP ke bawah. Baiknya tingkat pendidikan ini diharapkan pekerja/karyawan memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang lebih baik dalam upaya untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 mencapai Rp. 2.145.896. Rata-rata upah/gaji tertinggi pada Agustus 2021 diterima oleh pekerja/karyawan di Sektor Jasa, yaitu sekitar Rp. 2.358.828, diikuti oleh Sektor Industri sebesar Rp. 1.841.686 dan terendah Sektor Pertanian yang hanya mencapai Rp. 1.201.293. Pada Agustus 2021, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan mengalami penurunan sebesar Rp 11.110. Penurunan upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 dipicu oleh penurunan upah/gaji pada Sektor Jasa, yaitu turun Rp 35.654. Penurunan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 sebagai dampak pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 pada Bulan Juli-Agustus 2021.

Peringkat UMP D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan UMP tahun 2021. UMP D.I Yogyakarta pada tahun 2022 meningkat satu tingkat menjadi peringkat terendah kedua, yaitu menjadi sebesar Rp. 1.840.915 atau mengalami kenaikan 4,30 persen dibandingkan UMP tahun 2021. Upah Minimum Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta pada tahun 2022 mengalami kenaikan antara 4,04 - 7,34 persen. UMK pada tahun 2022 tertinggi ada di Kota Yogyakarta, yaitu mencapai Rp 2.153.970. Tertinggi berikutnya diikuti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan paling sedikit ada di Kabupaten Gunungkidul.

Jumlah lowongan pekerjaan D.I Yogyakarta pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan pencari kerja, yaitu tersedia sebanyak 17.323 lowongan dan hanya terdapat sebanyak 15.937 orang pencari kerja. Jumlah lowongan kerja tersebut sebenarnya sudah cukup ideal, akan tetapi pencari kerja di D.I Yogyakarta yang berhasil ditempatkan hanya sebanyak 8.465 orang atau 53,12 persen dari total pencari kerja. Tidak seimbangya tingkat penyerapan pencari kerja dengan lowongan kerja kemungkinan disebabkan karena kompetisi pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja di D.I Yogyakarta tidak hanya diikuti pencari kerja dari D.I Yogyakarta, akan tetapi juga pencari kerja dari luar D.I Yogyakarta.

Dalam upaya memberikan kesempatan kerja bagi pencari kerja, pemerintah terus berupaya membuka kesempatan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah TKI yang signifikan. Pada periode 2019-2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri terus mengalami penurunan. Sebelum pandemi Covid-19, jumlah TKI ada sebanyak 1.114 orang dan pada tahun 2020 berkurang sangat signifikan, yaitu menjadi 192 orang atau berkurang sebanyak 82,76 persen dibanding tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 turun kembali menjadi 107 orang atau turun 44,27 persen terhadap tahun 2020.



BAB I PENDAHULUAN

<https://yogyakarta.bps.go.id>



1.1. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi kelangsungan ekonomi suatu wilayah atau negara. Faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal tanpa adanya tenaga kerja. Oleh karena itu, ketenagakerjaan harus menjadi perhatian utama pemerintah dari waktu ke waktu dengan cara memajukan dan melindungi pekerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sesuai dengan ketentuan internasional, batas usia kerja yang berlaku di Indonesia yaitu antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi mereka yang sudah memiliki pekerjaan; atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja; dan yang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sementara itu yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja; tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan; penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Sedangkan penduduk di luar usia kerja yaitu berusia di bawah 15 tahun atau berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, lanjut usia (lansia), dan anak-anak.

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja. Jadi definisi dari kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak diiringi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran.

Kesejahteraan seluruh masyarakat pada dasarnya adalah kesejahteraan para pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Bahkan pendapatan suatu negara baik berupa penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak sesungguhnya berasal dari hasil pekerja, baik berasal dari pekerja sebagai fungsi produksi maupun pekerja sebagai fungsi konsumsi.

Masalah tenaga kerja di D.I. Yogyakarta sangat kompleks dan besar. Dikatakan kompleks karena permasalahannya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Dikatakan besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja di masa yang akan datang tidaklah gampang karena selain mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, juga harus diketahui prospek produksi di masa mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja di samping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha.

Persoalan ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki tenaga

kerja, latar belakang pendidikan yang rendah, lapangan kerja yang tidak sesuai, dan kurangnya kesadaran akan *entrepreneurship*. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Rucker (1985:2) sebagaimana dilansir oleh majalah Nakertrans, menduga bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi yang bertumpu pada penciptaan lapangan kerja merupakan keharusan. Dalam kaitan ini, masih sangat relevan untuk diperhatikan secara serius dua elemen strategi yang pernah diajukan oleh Misi ILO (1999:5) yaitu (i) strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan, dan (ii) tindakan yang dibutuhkan untuk mendapatkan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil, atau bila ada kenaikan *output* perkapita. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output* riil per orang.

Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang dan mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya, kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang.

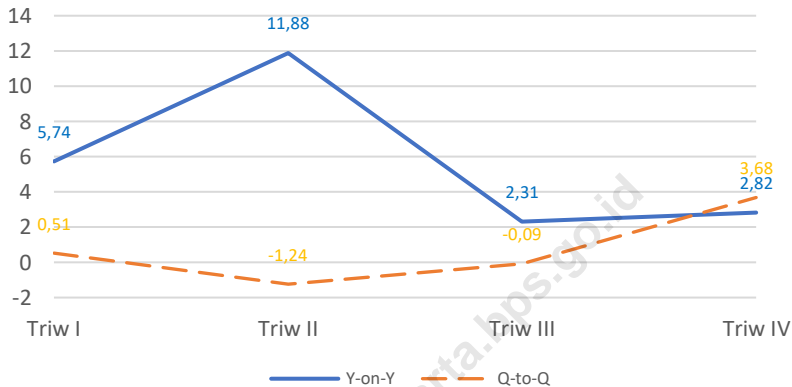
Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber daya alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Sebenarnya, positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Memasuki tahun 2021 kondisi perekonomian D.I Yogyakarta sudah mengarah perbaikan. Perekonomian D.I Yogyakarta triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I tahun 2020 (y-on-y) tumbuh 5,74 persen dan pada triwulan II tahun 2021 bahkan meningkat dua kali lipat, yaitu menjadi 11,88 persen. Sejak Juli 2021 kasus Covid-19 meningkat kembali dengan masuknya varian Delta. Pemerintah kembali mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan D.I Yogyakarta pada Juli-Agustus 2021 diberlakukan PPKM Darurat Level 4. Kebijakan ini berdampak pada perekonomian D.I Yogyakarta pada triwulan III tahun 2021 mengalami keterpurukan, yaitu perekonomian hanya mampu

tumbuh 2,31 persen terhadap triwulan III tahun 2020. Kondisi ekonomi yang kurang membaik secara langsung berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja di D.I Yogyakarta

Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan D.I Yogyakarta Tahun 2021 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bahwa tingkat pengangguran di wilayah D.I. Yogyakarta kondisi Agustus 2021 adalah sebesar 4,56 persen. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan TPT Agustus 2020 yang mencapai 4,57 persen (turun tipis 0,01 persen poin). Walaupun secara TPT turun tipis, akan tetapi secara nilai jumlah pengangguran meningkat sekitar 4,58 ribu orang, yaitu dari 101,85 ribu orang pada Agustus 2020 menjadi 106,43 ribu orang pada Agustus 2021. Kondisi ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak bulan Maret 2020 dan pada Juli-Agustus 2021 diberlakukan PPKM Darurat akibat meningkatnya kembali kasus Covid-19 varian Delta.

Tantangan besar pemerintah pusat dan daerah adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak (*decent work*) bagi tenaga kerja yang jumlahnya banyak dan cenderung terus meningkat. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktifitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*). Meskipun demikian, peran yang dimainkan pemerintah sangat menentukan jika dilakukan melalui pembangunan yang secara benar dan konsisten yang dirancang berbasis ketenagakerjaan, serta dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang dapat memenuhi semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

Kualitas tenaga kerja D.I. Yogyakarta juga menjadi kendala, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja, seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif dan kreativitas, kesehatan serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi kedisiplinan kerja, tingkat kerja sama, perasaan aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminati. Motivasi bekerja yang kurang atau kekurangmampuan tenaga kerja akan membuat pekerjaannya tidak membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Keterampilan tenaga kerja pun sangat mempengaruhi kualitas kerjanya, sehingga kualitas

tenaga kerja dan hasil produksinya kurang maksimal. Agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi diperlukan pekerja dengan produktivitas yang tinggi. Kondisi ini harus dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Untuk itu, pekerja harus dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Visi Indonesia yang maju dan mandiri tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum yang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saingnya. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan pendidikan sehingga memiliki daya saing dalam era global. Itu dilakukan dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi.

Modal sumber daya manusia merupakan sumber penggerak pertumbuhan dan daya saing yang sangat diperlukan dalam pasar global, karenanya harus ada jaminan bahwa anak-anak atau generasi penerus akan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah agar mendapatkan bekal

pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai ketika mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, akses terhadap pendidikan harus ditingkatkan, meningkatkan kebijakan sosial seperti beasiswa, subsidi sekolah, dan bantuan tunai bersyarat untuk memastikan anak-anak lulus SD dan SMP. Juga perlu diselenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Karena itu, perlu disediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang memadai. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan pendidikan.

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang kondusif, diantaranya mencakup kualitas pendidikan, kesinambungan sosial, dan lingkungan usaha yang kondusif dan berkeadilan. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, posisi kebijakan fiskal, inflasi, dan perdagangan. D.I. Yogyakarta memiliki berbagai anugerah berlimpah sebagai sumber potensial penyumbang pertumbuhan ekonomi, yakni lahan yang subur, sumber daya alam, meningkatnya masyarakat kelas menengah, dan konsumsi dalam negeri yang kuat, kedekatan geografis dengan tujuan-tujuan utama ekspor, serta jumlah tenaga kerja yang besar.

Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan

pekerja/karyawan secara menyeluruh, kebijakan di bidang perlindungan tenaga kerja diarahkan kepada perbaikan upah, persyaratan kerja, kondisi kerja, dan jaminan sosial lainnya.

Beberapa permasalahan ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta antara lain adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan perluasan lapangan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan pengangguran.

Kualitas tenaga kerja dapat ditentukan dengan cara melihat tingkat pendidikan. Data Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa pekerja/buruh karyawan di D.I. Yogyakarta dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yakni 26,98 persen berpendidikan SMP ke bawah, sementara itu untuk yang berpendidikan SMA sebesar 45,81 persen dan berpendidikan Perguruan Tinggi 27,21 persen. Dibandingkan Agustus 2020, pekerja/karyawan berpendidikan SMP ke bawah mengalami penurunan dan peningkatan untuk yang berpendidikan SMA ke atas. Angka ini menunjukkan perbaikan peningkatan kualitas pekerja/karyawan.

D.I. Yogyakarta yang telah memasuki era bonus demografi memiliki jumlah angkatan kerja yang melimpah, namun dalam konteks lapangan kerja jumlahnya masih terbatas sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini berdampak meningkatnya pengangguran karena tenaga kerja yang tersedia tidak tertampung dalam lapangan kerja. Selain itu, persebaran angkatan kerja di D.I. Yogyakarta masih belum merata. Data Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di D.I. Yogyakarta sebanyak 2,33 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 31,66 persen berada di Kabupaten Sleman; 25,50 persen di Kabupaten Bantul; 20,09 persen di Kabupaten Gunungkidul, 11,52

persen di Kabupaten Kulon Progo dan 11,23 persen di Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut jumlah orang yang bekerja sebanyak 2,23 juta jiwa, dan pengangguran sebanyak 106,43 ribu jiwa. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di D.I. Yogyakarta sebesar 4,56 persen, TPT tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 9,13 persen; diikuti Kabupaten Sleman sebesar 5,17 persen; Kabupaten Bantul sebesar 4,04 persen; Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,69 persen; dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,20 persen.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan dilakukan dengan usaha pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan keadaan tingkat hidup pekerja/karyawan yang dikemas pada publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan. Publikasi ini disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerminan dari Statistik Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan.

1.2. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan berbagai indikator ketenagakerjaan kondisi tahun 2021 dan beberapa series sebelumnya. Beberapa indikator ketenagakerjaan yang disajikan meliputi penduduk yang bekerja, pekerja/karyawan, pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha, pekerja/karyawan menurut pendidikan, rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan, upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pasar tenaga kerja.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Publikasi

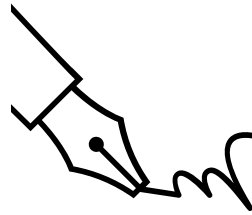
Tujuan dan manfaat dari penyusunan publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan ini adalah:

1. Memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan;

2. Menunjang perencanaan pembangunan di masa kini dan yang akan datang;
3. Memberikan informasi bagi masyarakat, pemangku kepentingan serta peminat masalah sosial dan ketenagakerjaan.

1.4. Sistematika Publikasi

Publikasi ini disajikan secara berurutan yang terdiri dari empat bab. Bab I menyajikan latar belakang penyusunan publikasi tingkat hidup pekerja/karyawan, ruang lingkup, *tujuan* dan manfaat penyusunan publikasi, serta sistematika publikasi. Bab II membahas tentang metodologi yang mencakup sumber data, konsep dan definisi. Bab III menyajikan hasil perhitungan dan analisis hasil tentang penduduk yang bekerja, pekerja/karyawan, pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha, pekerja/karyawan menurut pendidikan, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan, upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi, serta pasar tenaga kerja. Terakhir Bab IV merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



BAB 2

METODOLOGI



<https://yogyakarta.bps.go.id>



2.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Dilihat dari perkembangannya, Sakernas telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1976, baik cakupan sampel, wilayah dan rumah tangga maupun periode pencacahan. Sakernas pada tahun 1986 sampai dengan 1993 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November). Pada tahun 1994 sampai dengan 1999, Sakernas dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2000 sampai dengan 2001 secara semesteran (Februari dan Agustus), kemudian tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara semesteran juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 hingga 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran, Semester I (Februari) dan Semester II (Agustus).

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November untuk mendapatkan angka estimasi provinsi dan pada bulan Agustus dilakukan penambahan sampel untuk angka estimasi kabupaten/kota. Unit pencacahannya adalah rumah tangga dan mencakup seluruh wilayah

Indonesia. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan dan mulai tahun 2015 sampai tahun 2021 Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) yaitu Februari dan Agustus. Secara rinci perjalanan pelaksanaan Sakernas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sejarah Sakernas 1976 – 2021

Periode	Waktu Pelaksanaan	Level Estimasi	Cakupan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1976 – 1985	Tidak Setiap Tahun	Provinsi	Indonesia*
1986 – 1989	Triwulanan	Provinsi	Indonesia*
1990 – 1993	Triwulanan	Provinsi	Indonesia*
1994 – 1999	Tahunan	Provinsi	Indonesia*
2000	Semesteran	Pulau	Indonesia**
2001	Semesteran	Pulau	Indonesia
2002 – 2004	Triwulanan	Provinsi	Indonesia
2005 – Februari 2007	Semesteran	Provinsi	Indonesia
Agustus 2007 – 2010	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia
2011 – 2014	Triwulanan	Kabupaten/kota	Indonesia
2015	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia
2016	Semesteran	Provinsi	Indonesia
2017-2021	Semesteran	Kabupaten/kota	Indonesia

Keterangan:

*) Tahun 1976 – 1978 tanpa Timor Timur,

***) Tahun 2000 tanpa Maluku

Selain data Sakernas, sumber data yang digunakan pada publikasi ini adalah publikasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka dan data sekunder yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan Berdasarkan *International Conference of Labour Statistician (ICLS) ke-13*



2.2. Konsep Dan Definisi

Teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas Agustus 2021 menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians (ICLS) 13* tahun 1982.

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia atau wilayah observasi selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.
3. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
4. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
5. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Termasuk orang yang sementara tidak bekerja yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar atau mogok kerja. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
6. **Pengangguran** adalah meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulai.

7. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
8. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu:
 - a. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
 - c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
 - d. **Buruh/Karyawan/Pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir,

khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- e. **Pekerja bebas di pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

g. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- ✓ Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
- ✓ Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.

9. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, didasarkan atas Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada ISCO 2008.

10. **Upah/gaji bersih** adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah/gaji bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

11. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

BAB 3

HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS



<https://yogyakarta.bps.go.id>

HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS

3.1. Tenaga Kerja

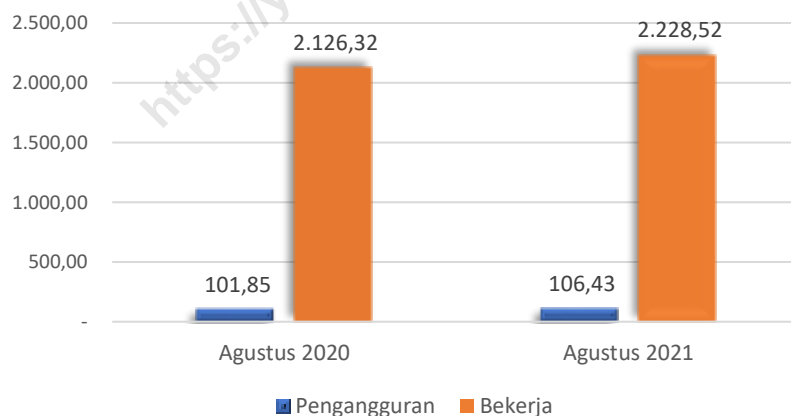
Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Sebaliknya penduduk berumur di bawah 15 tahun termasuk dalam kategori bukan usia kerja. Berdasarkan kegiatan aktivitasnya, penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut dengan Angkatan Kerja (AK) dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK). Selanjutnya Angkatan Kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk kategori pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan suatu usaha baru; yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Sementara itu yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan data Sakernas Agustus 2021 mencapai 3,18 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 43,04 ribu orang atau setara dengan 1,37 persen apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020 (3,13 juta orang). Sementara itu pada periode yang

sama, jumlah angkatan kerja di D.I. Yogyakarta mencapai 2,33 juta orang atau meningkat 106,79 ribu orang (4,79 persen) dibandingkan Agustus 2020. Kenaikan angkatan kerja ini lebih didominasi karena semakin membaiknya pasar kerja setelah pandemi Covid-19 menginjak tahun yang kedua. Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2020 di D.I. Yogyakarta sebanyak 2,13 juta jiwa meningkat menjadi 2,23 juta jiwa atau naik 4,81 persen pada Agustus 2021. Namun demikian, walaupun jumlah penduduk yang bekerja meningkat, tetapi pengangguran juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 meningkat 4,59 ribu orang atau setara dengan kenaikan 4,50 persen dibandingkan Agustus 2020. Peningkatan jumlah pengangguran ini merupakan penduduk terdampak pandemi Covid-19 yang masih menyisakan hingga Agustus 2021.

Gambar 3.1. Jumlah Angkatan Kerja D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (ribu orang)



Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga meningkat. Pada Agustus 2021, TPAK di D.I. Yogyakarta sebesar

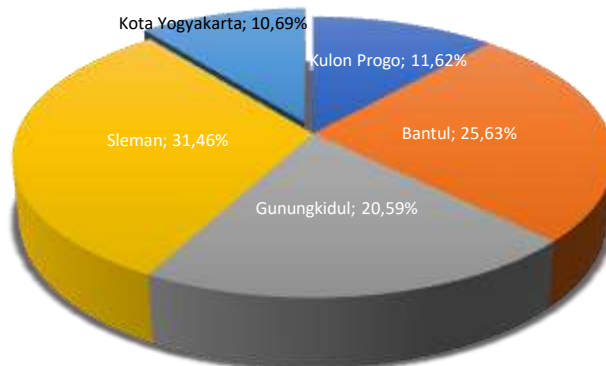
73,52 persen atau meningkat 2,40 persen poin dibandingkan Agustus 2020 yang mencapai 71,12 persen. Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki di D.I. Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran ini terlihat pada keadaan Agustus 2020 maupun Agustus 2021. TPAK laki-laki pada Agustus 2021 mencapai 82,83 persen, sementara TPAK perempuan hanya mencapai 64,59 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat sekitar 82 orang dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki termasuk dalam kategori angkatan kerja. Sementara dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan yang termasuk kategori angkatan kerja hanya sekitar 64 orang. Rendahnya TPAK perempuan dikarenakan jumlah penduduk usia kerja perempuan yang mengurus rumah tangga lebih banyak dibandingkan laki-laki dan sebaliknya jumlah penduduk perempuan yang bekerja lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Sedangkan apabila dilihat menurut tipe daerah, menunjukkan bahwa TPAK perdesaan lebih tinggi dibandingkan TPAK perkotaan. TPAK perdesaan pada Agustus 2021 mencapai 77,91 persen, sementara TPAK perkotaan hanya mencapai 72,01 persen. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk bukan angkatan kerja di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Tersedianya lembaga pendidikan yang cukup memadai menyebabkan sebagian besar bukan angkatan kerja di perkotaan masih bersekolah, sedangkan penduduk di perdesaan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya lebih memilih bekerja.

Indikator penting lainnya dalam ketenagakerjaan adalah rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau dikenal dengan *Employment to Population Ratio* (EPR). Pada Agustus 2021 angka EPR di D.I. Yogyakarta sebesar 70,17. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dari

100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas pada Agustus 2021 di D.I. Yogyakarta terdapat sekitar 70 orang yang bekerja. EPR ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020 yang mencapai 67,87 atau turun 2,30 poin. Jika dilihat menurut jenis kelamin EPR laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan EPR perempuan. Pada Agustus 2021 EPR laki-laki sebesar 78,46 dan EPR perempuan sebesar 62,21. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih mudah terserap di lapangan kerja dibanding pekerja perempuan. Selain itu laki-laki bekerja karena tuntutan sebagai penanggung jawab nafkah utama rumah tangga.

Sementara itu berdasarkan tipe daerah, EPR perdesaan lebih tinggi dibandingkan EPR perkotaan. EPR di wilayah perdesaan mencapai 76,19 dan wilayah perkotaan sebesar 68,09. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk daerah perdesaan tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan sehingga lebih mudah terserap dalam pekerjaan dibanding penduduk daerah perkotaan. Penduduk perdesaan tidak terlalu memperhatikan tingkat kelayakan upah.

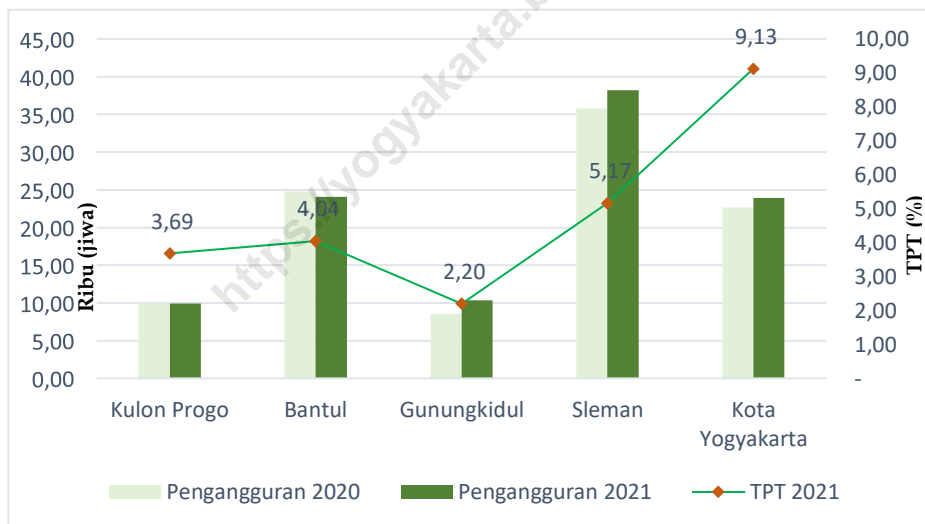
Gambar 3.2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta, Agustus 2021 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2021

Distribusi penyebaran penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta tidak merata. Sebagian besar penduduk bekerja berada di Kabupaten Sleman yang mencapai 31,46 persen, diikuti Kabupaten Bantul (25,63 persen) dan paling sedikit berada di Kota Yogyakarta (10,69 persen) seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2. Rendahnya distribusi tenaga kerja di Kota Yogyakarta sebagai ibu kota D.I Yogyakarta mengindikasikan banyaknya infrastruktur pendidikan dibandingkan empat kabupaten lainnya sehingga penduduk usia 15 tahun ke atas lebih didominasi sebagai pelajar atau mahasiswa dibandingkan sebagai pekerja.

Gambar 3.3. Jumlah Pengangguran dan TPT D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2020 dan Agustus 2021



Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021 bahwa jumlah pengangguran di D.I. Yogyakarta sebanyak 106,43 ribu orang atau meningkat 4,58 ribu orang dibanding Agustus 2020 yang mencapai 101,85 ribu orang. Rendahnya penambahan jumlah pengangguran tersebut mengakibatkan tingkat

pengangguran terbuka (TPT) relatif tetap, yaitu dari 4,57 persen pada Agustus 2020 dan 4,56 persen pada Agustus 2021. TPT sebesar 4,56 persen mengandung arti bahwa dari 100 orang Angkatan kerja di D.I. Yogyakarta terdapat sekitar 4 sampai 5 orang yang termasuk penganggur. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa TPT Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di atas TPT D.I Yogyakarta, sedangkan TPT Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul di bawah TPT D.I Yogyakarta. TPT tertinggi pada Agustus 2021 mencapai 9,13 persen berada di Kota Yogyakarta dan TPT terendah sebesar 2,20 persen ada di Kabupaten Gunungkidul.

3.2. Pekerja/karyawan

Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya Pasal 1 angka (3) dari undang–undang tersebut menyebutkan bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pernyataan ini selanjutnya dirumuskan bahwa pekerja/karyawan penerima upah adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain (Maimun, 2003).

Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit pekerjaan disebut status pekerjaan. Status pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas dibedakan menjadi 7 yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

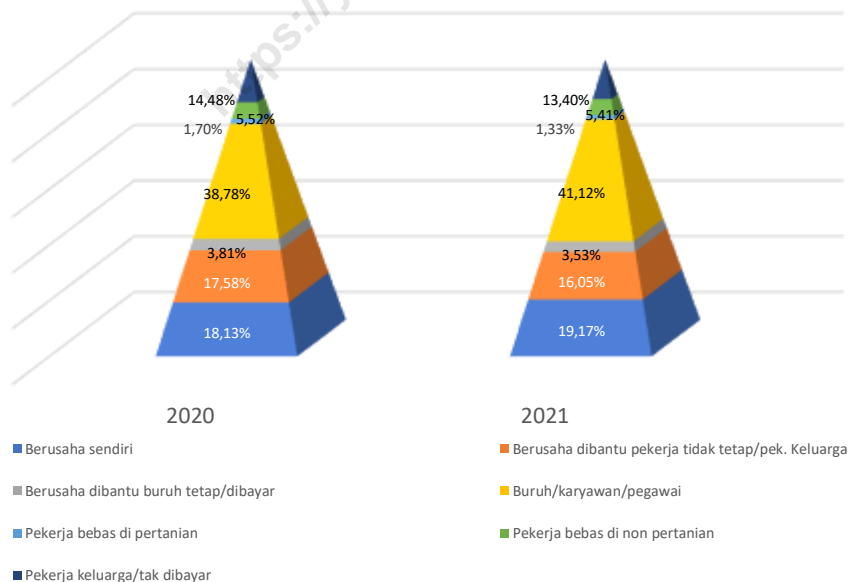
Status pekerjaan inilah yang membedakan karyawan satu dengan lainnya. Status pekerjaan mempengaruhi upah dan kepuasan kerja pekerja/karyawan.

Status pekerjaan juga merupakan bagian yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja/karyawan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi karena pekerja/karyawan membutuhkan kejelasan apakah pekerja/karyawan tersebut merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Karyawan tetap memiliki keuntungan lebih dibanding karyawan tidak tetap atau kontrak. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawan tetap akan mendapatkan pesangon dan pengganti hak-hak jika ada, sedangkan karyawan tidak tetap jika mengundurkan diri harus membayar uang penalti yang biasanya berupa biaya sejumlah gaji selama periode tertentu. Disamping itu pekerja/karyawan tetap memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki pekerja/karyawan tidak tetap seperti mendapatkan upah lembur jika bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan; jaminan Sosial dan K3 (Keselamatan serta Kesehatan Kerja); menerima upah yang layak; pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur; karyawan perempuan memiliki hak perlindungan selama masa kehamilan; cuti keguguran; hak menyusui; dan memiliki hak cuti hamil dan cuti melahirkan; hak perlindungan selama masa kehamilan. Oleh karena itu demi keamanan finansial, kepastian karier dan status, umumnya pekerja/karyawan lebih suka memilih untuk menjadi pekerja/karyawan tetap dibanding pekerja/karyawan tidak tetap. Jadi kedudukan karyawan tetap dinilai lebih tinggi dibandingkan karyawan tidak tetap.

Seperti disebutkan sebelumnya, pekerja/karyawan merupakan tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah/gaji atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu pekerja/karyawan disebut juga pekerja penerima

upah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pekerja/karyawan penerima upah pada publikasi ini meliputi penduduk yang bekerja dengan status karyawan/buruh tetap, pekerja bebas pertanian, dan pekerja bebas non pertanian. Pekerja keluarga/tidak dibayar tidak termasuk sebagai pekerja/karyawan karena tidak menerima upah. Sedangkan penduduk bekerja dengan status berusaha mencakup status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar. Dari data status pekerjaan dapat diperoleh informasi keadaan dinamika pasar kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dimana kemajuan pembangunan ketenagakerjaan mengharapkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja digaji/dibayar (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

Berdasarkan Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama distribusinya tidak jauh berbeda dibanding dengan keadaan Agustus 2020. Mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di D.I. Yogyakarta berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dan paling sedikit berstatus pekerja bebas pertanian. Persentase penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2021 mencapai 41,12 persen dan jika dibandingkan dengan Agustus 2020 naik 2,34 persen poin. Sementara itu penduduk bekerja yang berstatus pekerja bebas pertanian hanya mencapai 1,33 persen atau turun sebesar 0,37 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Apabila status pekerjaan dikelompokkan menjadi 3 status, yaitu berusaha, pekerja/karyawan dan pekerja keluarga/tidak dibayar maka jumlah pekerja/karyawan menempati jumlah terbanyak. Persentase penduduk bekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 mencapai 47,86 persen. Pekerja/karyawan tersebut terdiri dari penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai sebanyak 41,12 persen dan berstatus pekerja bebas sebanyak 6,74 persen. Dibandingkan kondisi Agustus 2020, persentase penduduk bekerja/karyawan pada Agustus 2021 naik sebesar 1,86 persen poin. Kenaikan utamanya terjadi pada penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai (naik 2,34 persen poin), sedangkan yang berstatus pekerja bebas justru turun sebesar 0,48 persen poin.

Selanjutnya persentase penduduk bekerja dengan status berusaha pada Agustus 2021 mencapai 38,75 persen. Penduduk yang berusaha tersebut terdiri dari status berusaha sendiri sebanyak 19,17 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 16,05 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar sebanyak 3,53 persen.

Dibandingkan Agustus 2020, penduduk yang berusaha di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 turun sebesar 0,77 persen poin. Penurunan penduduk yang berusaha terjadi pada penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap (0,28 persen poin) maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap (1,53 persen poin). Sementara itu status berusaha sendiri mengalami peningkatan sebesar 1,04 persen poin. Seperti halnya penduduk yang berstatus berusaha, penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2021 juga mengalami penurunan. Persentase pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2021 sebanyak 13,40 persen atau turun 1,08 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)

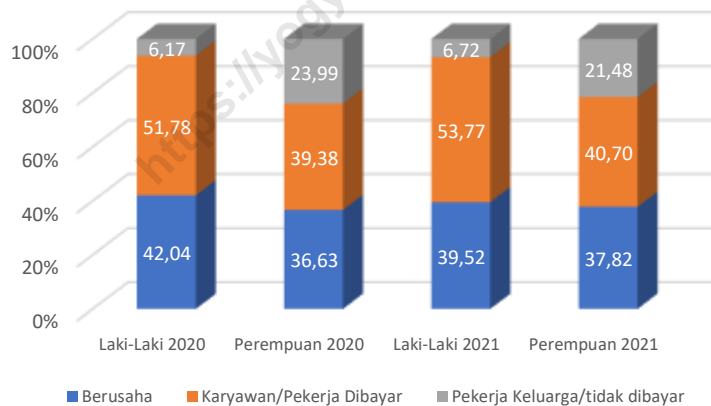
Status Pekerjaan	Agustus 2020			Agustus 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	19,01	17,12	18,13	18,81	19,61	19,17
2	18,28	16,78	17,58	16,25	15,80	16,05
3	4,75	2,73	3,81	4,45	2,41	3,53
4	41,01	36,24	38,78	43,13	38,68	41,12
5	1,82	1,57	1,70	1,47	1,16	1,33
6	8,96	1,57	5,52	9,17	0,86	5,41
7	6,17	23,99	14,48	6,72	21,48	13,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

- 1 = Berusaha sendiri;
- 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar;
- 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar;
- 4 = Buruh/karyawan/pegawai;
- 5 = Pekerja bebas pertanian;
- 6 = Pekerja bebas non pertanian;
- 7 = Pekerja keluarga/tidak dibayar

Pola serupa juga terjadi pada penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin. Sebagian besar status pekerjaan utama didominasi oleh laki-laki, kecuali berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tidak dibayar didominasi perempuan. Penduduk laki-laki yang berstatus berusaha mencapai 39,52 persen, sedangkan perempuan sebanyak 37,82 persen. Demikian pula pekerja/karyawan laki-laki sebanyak 53,77 persen dan perempuan hanya mencapai 40,70 persen. Jika dibandingkan kondisi Agustus 2020, peningkatan persentase pekerja/karyawan laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan yaitu sebesar 1,98 persen poin bagi laki-laki dibanding 1,32 persen poin bagi perempuan.

Gambar 3.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

Berbeda dengan penduduk yang berstatus berusaha dan pekerja/karyawan, perempuan yang berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar mencapai 21,48 persen, sedangkan laki-laki hanya mencapai 6,72

persen. Persentase perempuan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar lebih dari 3 kali lipatnya pekerja keluarga/tidak dibayar laki-laki. Kenyataan ini dapat dipahami karena perempuan yang bekerja, disamping mencari nafkah mereka mempunyai tugas pokok domestik di rumah tangga dan kegiatan publik di masyarakat. Dengan demikian perempuan tidak bisa sepenuhnya mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk kerja mencari nafkah, apalagi lokasi pekerjaan yang jauh dari keluarga. Setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia lebih dari setahun, berangsur-angsur meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Hal ini terlihat dari persentase perempuan yang bekerja dengan status berusaha dan pekerja/karyawan pada Agustus 2021 meningkat, sedangkan yang berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar menurun dibandingkan Agustus 2020. Sedangkan persentase laki-laki bekerja dengan status pekerja/karyawan dan pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2021 meningkat dan yang berstatus berusaha turun dibanding Agustus 2020.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, tercatat bahwa pada Agustus 2021 ada 2,23 juta penduduk usia kerja yang bekerja, 72,14 persen diantaranya tinggal di perkotaan dan 27,86 persen tinggal di perdesaan. Jika diamati menurut statusnya, penduduk pada Agustus 2021 yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar lebih banyak berada di perdesaan, sedangkan yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai lebih banyak berada di perkotaan. Pola serupa juga terjadi pada Agustus 2020. Hal ini selaras dengan kondisi perdesaan yang masih tersedia lahan kosong sehingga pengusaha lebih leluasa dalam melakukan aktifitas kerja atau memperluas ruang usaha. Demikian juga di perdesaan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia

lebih banyak tersedia dan relatif lebih murah yang dampaknya akan mengurangi biaya produksi dan lebih menguntungkan. Pekerja keluarga/tidak dibayar umumnya merupakan orang-orang sederhana dan tidak menuntut balas jasa. Mereka ini kebanyakan tinggal di perdesaan. Sementara itu buruh/karyawan/pegawai sebagian besar tinggal di perkotaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar status pekerjaannya semakin meningkat dan dapat mengikuti perkembangan jaman.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)

Status Pekerjaan	Agustus 2020			Agustus 2021		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	19,60	14,15	18,13	20,03	16,97	19,17
2	14,27	26,52	17,58	12,98	23,99	16,05
3	4,44	2,11	3,81	3,97	2,38	3,53
4	44,19	24,13	38,78	47,23	25,28	41,12
5	1,23	3,00	1,70	1,26	1,50	1,33
6	4,90	7,20	5,52	3,97	9,14	5,41
7	11,37	22,89	14,48	10,56	20,74	13,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

1 = Berusaha sendiri;

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar;

3 = Berusaha dibantu buruh tetap/pekerja dibayar;

4 = Buruh/karyawan/pegawai;

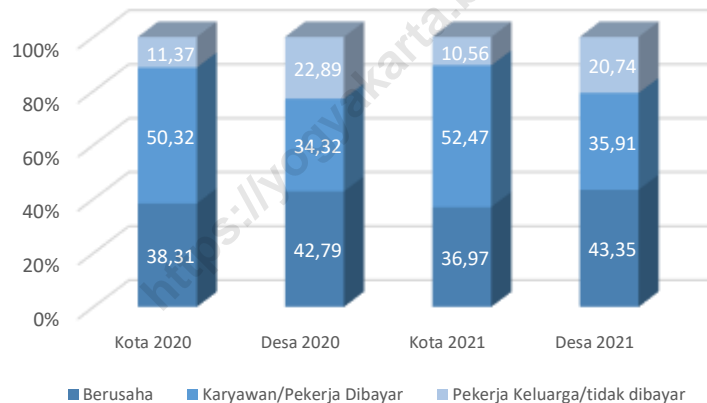
5 = Pekerja bebas pertanian;

6 = Pekerja bebas non pertanian;

7 = Pekerja keluarga/tidak dibayar

Buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2021 di perkotaan mendominasi dari status pekerjaan lainnya. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada Agustus 2021 sebanyak 47,23 persen dari total penduduk yang bekerja di perkotaan berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan buruh/karyawan/pegawai di perdesaan hanya mencapai 25,28 persen. Terbanyak berikutnya di perkotaan berstatus berusaha sendiri, yaitu mencapai 20,03 persen dan diikuti berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 12,98 persen.

Gambar 3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

Berdasarkan Gambar 3.6 terlihat bahwa pekerja/karyawan pada Agustus 2020 maupun Agustus 2021 di perkotaan mendominasi, sedangkan di perdesaan didominasi penduduk yang bekerja dengan status berusaha. Pekerja/karyawan pada Agustus 2021 di perkotaan mencapai 52,47 persen. Dari sejumlah tersebut 47,23 persen diantaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, 1,26 persen pekerja bebas pertanian dan 3,97

persen pekerja bebas non pertanian. Sementara itu pekerja/karyawan yang tinggal di perdesaan ada sebanyak 35,91 persen, dengan rincian 25,28 persen sebagai buruh/karyawan/pegawai, 1,50 persen pekerja bebas pertanian dan 9,14 persen pekerja bebas non pertanian.

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun dan pasar tenaga kerja sudah berangsur-angsur pulih kembali. Hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk yang bekerja dengan status pekerja/karyawan pada Agustus 2021 semakin meningkat dibandingkan Agustus 2020. Jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, persentase karyawan/pekerja pada Agustus 2021 mengalami peningkatan 1,85 persen poin. Peningkatan persentase pekerja/karyawan juga terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan persentase pekerja/karyawan di perkotaan (2,15 persen poin) lebih cepat dibandingkan dengan perdesaan (1,59 persen poin). Peningkatan pekerja/karyawan disebabkan karena meningkatnya penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2021 di perkotaan maupun di perdesaan. Berbeda dengan pekerja bebas yang justru persentasenya mengalami penurunan.

Penduduk bekerja dengan status berusaha pada Agustus 2021 sebanyak 38,75 persen atau menurun 0,77 persen poin apabila dibandingkan Agustus 2020. Secara kuantitatif jumlah penduduk dengan status berusaha lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Namun jika dilihat dari distribusinya, persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan (Gambar 3.6). Penduduk yang bekerja dengan status berusaha di perkotaan mencapai 36,97 persen atau menurun 1,34 persen poin, sedangkan di perdesaan mencapai 43,35 persen atau naik 0,57 persen poin jika dibandingkan Agustus 2020.

Selanjutnya secara umum persentase pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 1,08 persen poin. Hal ini kemungkinan disebabkan karena semakin membaiknya perekonomian berdampak pada kembalinya pekerja keluarga/tidak dibayar di perkotaan maupun perdesaan menjadi pekerja/karyawan. Persentase pekerja keluarga/tidak dibayar di perdesaan pada Agustus 2021 menurun sebesar 2,16 persen poin dibandingkan Agustus 2020 dan pekerja keluarga/tidak dibayar di perkotaan turun 0,81 persen poin.

3.3. Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha

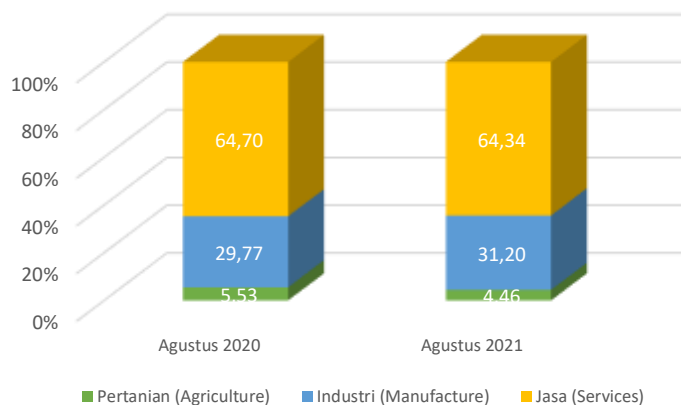
Lapangan usaha/pekerjaan merupakan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha disajikan dalam 17 kategori mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC) revisi 4. Tujuh belas (17) kategori yang dimaksud adalah:

- A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- B. Pertambangan dan penggalian;
- C. Industri pengolahan;
- D. Pengadaan listrik dan gas;
- E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor;
- H. Transportasi dan pergudangan;
- I. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- J. Informasi dan komunikasi;
- K. Jasa keuangan dan asuransi;

- L. Real estat;
- M,N. Jasa perusahaan;
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- P. Jasa pendidikan;
- Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- R,S,T,U. Jasa lainnya.

Dalam penyederhanaan hasil dan pembahasan, sektor/lapangan usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu Sektor Pertanian atau *Agriculture* (A), Sektor Industri atau *Manufacture* (M) dan Sektor Jasa atau *Services* (S). Sektor pertanian meliputi lapangan pekerjaan di bidang pertanian tanaman, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sektor Industri meliputi lapangan pekerjaan di bidang pertambangan/penggalian, industri pengolahan, listrik/gas/air, dan konstruksi. Sedangkan Sektor Jasa meliputi lapangan pekerjaan di bidang perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa. Pekerja/karyawan yang dimaksud dalam subbab ini adalah pekerja/karyawan penerima upah.

Gambar 3.7. Persentase Pekerja/karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021.

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa Sektor Jasa (S) pada Agustus 2020 maupun Agustus 2021 merupakan sektor yang paling banyak menyerap pekerja/karyawan, yaitu kontribusinya sebesar 64,34 persen. Terbanyak berikutnya diikuti Sektor Industri (M) sebesar 31,20 persen dan paling sedikit Sektor Pertanian (A) sebesar 4,46 persen. Dibandingkan Agustus 2020, Sektor Industri (M) pada Agustus 2021 mengalami peningkatan, yaitu 1,43 persen poin. Sedangkan Sektor Pertanian (A) maupun Sektor Jasa (S) pada Agustus 2021 mengalami penurunan, yaitu secara berurutan turun sebesar 1,07 persen poin dan 0,36 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Tabel 3.3. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)

Sektor	Agustus 2020			Agustus 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	5,95	4,89	5,53	5,08	3,45	4,46
M	36,38	19,82	29,77	36,57	22,63	31,20
S	57,67	75,29	64,70	58,35	73,92	64,34
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

Keterangan:

A = Sektor Pertanian atau *Agriculture* ;

M = Sektor Industri atau *Manufacture*;

S = Sektor Jasa atau Sektor *Services*.

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa pada Agustus 2021 pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan sebagian besar terserap di Sektor Jasa (S), yaitu mencapai 64,34 persen. Pekerja/karyawan laki-laki yang

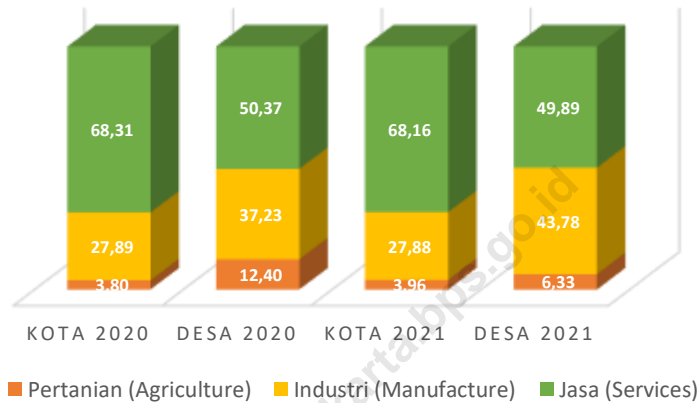
terserap di Sektor Jasa (S) mencapai 58,35 persen dan perempuan mencapai 73,92 persen. Tingginya pekerja/karyawan perempuan yang terserap di Sektor Jasa (S) dapat dipahami karena sektor ini pada umumnya tidak membutuhkan kemampuan fisik berlebih layaknya Sektor Pertanian (A) dan Sektor Industri (M). Dibandingkan Agustus 2020, pekerja/karyawan laki-laki yang terserap di Sektor Jasa (S) pada Agustus 2021 mengalami peningkatan, sedangkan perempuan mengalami penurunan.

Sementara pada Sektor Industri (M), baik laki-laki maupun perempuan pada Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen poin bagi laki-laki dan perempuan naik 2,81 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Pada Agustus 2021 Sektor Industri (M) mampu menyerap 36,57 persen pekerja/karyawan laki-laki dan hanya mampu menyerap pekerja/karyawan perempuan 22,63 persen. Sektor Pertanian (A) merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, pada Agustus 2021 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Pada tahun 2021 Sektor Pertanian (A) hanya mampu menyerap 4,46 persen pekerja/karyawan atau turun 1,07 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Hal serupa juga terjadi pada pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan. Pada Agustus 2021, Sektor Pertanian (A) hanya mampu menyerap 5,08 persen pekerja/karyawan laki-laki atau turun 0,87 persen poin dibandingkan Agustus 2020 dan pekerja/karyawan perempuan hanya mampu terserap 3,45 persen atau turun 1,44 persen poin.

Gambar 3.8 memperlihatkan distribusi pekerja/karyawan menurut tempat tinggal. Pada Agustus 2021 proporsi pekerja/karyawan di perkotaan yang bekerja di Sektor Jasa masih sangat dominan yaitu sebesar 68,16 persen, diikuti Sektor Industri sebesar 27,88 persen dan terendah Sektor Pertanian sebesar 3,96 persen. Komposisi yang sama terjadi di wilayah perdesaan dengan

kontribusi Sektor Jasa sebesar 49,89 persen diikuti Sektor Industri sebesar 43,78 persen dan Sektor Pertanian sebesar 6,33 persen.

Gambar 3.8. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan Agustus 2021

Gambar 3.8 juga menjelaskan terjadi perbedaan pola pergeseran pada masing-masing sektor selama periode Agustus 2020 dan Agustus 2021. Sektor Jasa (S) memiliki kontribusi paling besar dalam penyerapan pekerja/karyawan. Walaupun demikian, penyerapan pekerja/karyawan Sektor Jasa (S) pada Agustus 2021 di wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan, yaitu secara berurutan di perkotaan turun 0,15 persen poin dan perdesaan turun 0,48 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Sebaliknya, Sektor Industri (M) terjadi kenaikan kontribusi pekerja/karyawan, yaitu pada Agustus 2021 naik 1,43 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Kenaikan terutama disebabkan naiknya kontribusi Sektor Industri di perdesaan yang mencapai 6,55 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Sebaliknya kontribusi sektor ini di

perkotaan justru mengalami penurunan, yaitu turun sebesar 0,01 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Seperti halnya Sektor Jasa (S), pada periode yang sama Sektor Pertanian (A) juga mengalami penurunan, yaitu turun 1,08 persen poin. Penurunan dipicu kontribusi Sektor Pertanian pada Agustus 2021 di perdesaan turun sebesar 6,07 persen di bandingkan Agustus 2020. Turunnya penyerapan pekerja/karyawan di Sektor Pertanian dan meningkatnya penyerapan Sektor Industri di perdesaan kemungkinan disebabkan karena pekerja/karyawan terdampak pandemi Covid-19 yang sebelumnya beralih ke Sektor Pertanian dan saat ini kondisi perekonomian yang semakin membaik, berangsur-angsur beralih kembali bekerja ke Sektor Industri (M).

Tabel 3.4. Persentase Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)

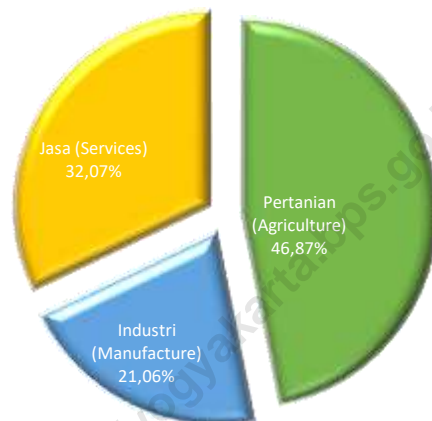
Lapangan Usaha Utama	2020	2021
(1)	(2)	(3)
<i>Agriculture/Pertanian (A)</i>	48,10	46,87
<i>Manufacture/Industri (M)</i>	18,35	21,06
<i>Service/Jasa (S)</i>	33,55	32,07
Persentase Total	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan 2021

Pekerja keluarga/tidak dibayar merupakan seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha, dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja tidak dibayar bisa merupakan anggota

rumah tangga, maupun bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerja keluarga/tidak dibayar adalah perempuan. Gambaran mengenai banyaknya pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan menurut lapangan usaha di D.I. Yogyakarta seperti ditunjukkan pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9. Persentase Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar Perempuan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021



Sumber: Sakernas Agustus 2021

Sektor Pertanian (A) merupakan sektor yang paling banyak menyerap pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan, diikuti Sektor Jasa (S) dan paling sedikit Sektor Industri (M). Pekerja keluarga/tidak dibayar berjenis kelamin perempuan paling banyak terserap di Sektor Pertanian (A) karena sektor ini merupakan sektor informal yang tidak mensyaratkan pendidikan, latihan, pengalaman/keahlian kerja, dan adanya fleksibilitas waktu sehingga tidak meninggalkan tugas utama perempuan dalam mengurus rumah tangga. Selama dua tahun terakhir, komposisi penyerapan pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan menurut sektor/lapangan usaha terjadi pergeseran. Pada Agustus 2021, penyerapan pekerja keluarga/tidak dibayar perempuan pada

Sektor Pertanian (A) mengalami penurunan sebesar 1,23 persen poin dari 48,10 persen pada Agustus 2020 menjadi 46,87 persen pada Agustus 2021. Demikian pula dengan perempuan dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar di Sektor Jasa (S) pada Agustus 2021 juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,48 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Sebaliknya mereka yang bekerja di Sektor Industri (M) justru meningkat dari 18,35 persen pada Agustus 2020 menjadi 21,06 persen pada Agustus 2021 atau naik 2,71 persen poin.

3.4. Pekerja/karyawan Menurut Pendidikan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pekerja/karyawan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan wawasan, intelektual, dan keterampilan seseorang. Seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keterampilan kerja sehingga meningkatkan kemampuan bekerja dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kualitas tenaga kerja dapat diindikasikan dengan tingkat pendidikannya. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kemampuan kerja juga rendah. Dampaknya akan berpengaruh terhadap rendahnya hasil produksi barang dan jasa, serta rendahnya upah yang diterima pekerja.

Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 didominasi tingkat pendidikan SLTA ke atas sebanyak 73,02 persen atau hampir $\frac{3}{4}$ nya dari seluruh pekerja/karyawan penerima upah. Sedangkan sisanya sebanyak 26,98 persen berpendidikan SLTP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta sudah cukup bagus sehingga diharapkan pekerja/karyawan memiliki kemampuan dan

keterampilan bekerja yang lebih baik dalam upaya untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Tabel 3.5. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (persen)

Tingkat Pendidikan	Agustus 2020			Agustus 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ SLTP	31,67	25,39	29,16	29,71	22,61	26,98
SLTA	49,11	36,32	44,01	50,12	38,91	45,81
>SLTA	19,22	38,29	26,83	20,17	38,48	27,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan Agustus 2021

Kondisi pekerja/karyawan pada Agustus 2021 jika dilihat menurut jenis kelamin menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Pekerja/karyawan laki-laki pada Agustus 2021 paling banyak berpendidikan SLTA, yaitu mencapai 50,12 persen. Terbanyak berikutnya berpendidikan SLTP ke bawah (29,71 persen) dan yang berpendidikan perguruan tinggi hanya mencapai 20,17 persen. Berbeda dengan pekerja/karyawan perempuan. Perempuan yang berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi hampir seimbang, yaitu 38,91 persen berpendidikan SLTA dan 38,48 persen berpendidikan perguruan tinggi. Sedangkan pekerja/karyawan perempuan yang berpendidikan SLTP ke bawah memiliki persentase paling sedikit (22,61 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan di D.I Yogyakarta maka semakin

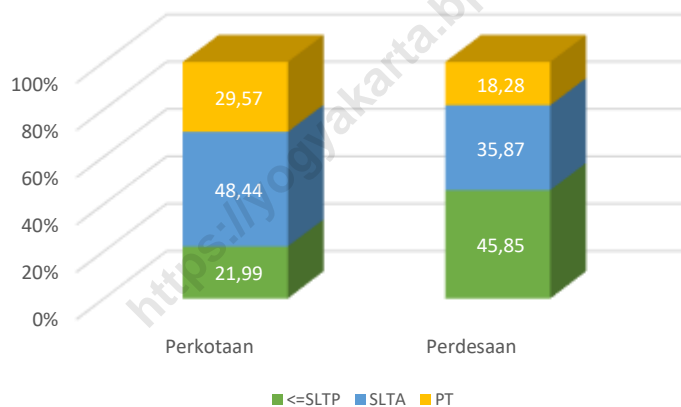
banyak yang terserap sebagai pekerja/karyawan. Sedangkan laki-laki yang berstatus pekerja/karyawan didominasi mereka yang pendidikan SLTA dan yang berpendidikan perguruan tinggi justru lebih sedikit. Rendahnya laki-laki yang berpendidikan tinggi dibandingkan SLTA kemungkinan disebabkan karena laki-laki yang telah menyelesaikan kuliahnya lebih memilih pekerjaan di luar D.I Yogyakarta yang dianggapnya memberikan penghasilan dan upah minimum yang lebih baik. Sedangkan bagi sebagian perempuan lebih memilih pekerjaan yang dekat dengan tempat tinggalnya karena mengutamakan mengurus rumah tangga.

Jika dilihat pergeseran struktur tingkat pendidikan pekerja/karyawan periode Agustus 2020 dan Agustus 2021 menunjukkan kecenderungan perbaikan pendidikan. Pekerja/karyawan dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah pada Agustus 2021 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020, yaitu turun sebesar 2,18 persen poin untuk tingkat pendidikan SLTP ke bawah. Sedangkan pekerja/karyawan dengan tingkat pendidikan SLTA dan perguruan tinggi mengalami kenaikan, yaitu secara berurutan masing-masing naik sebesar 1,80 persen poin dan 0,38 persen poin.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pergeseran struktur tingkat pendidikan pekerja/karyawan antara laki-laki dan perempuan mempunyai pola yang mirip. Dibandingkan Agustus 2020, pekerja/karyawan laki-laki di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah menurun sebesar 1,96 persen poin, sedangkan dengan tingkat pendidikan SLTA dan perguruan tinggi meningkat secara berurutan masing-masing sebesar 1,01 persen poin dan 0,95 persen poin. Pola serupa juga terjadi pada pekerja/karyawan perempuan. Pekerja/karyawan perempuan dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 2,77 persen. Sebaliknya

pekerja/karyawan perempuan dengan tingkat pendidikan SLTA dan perguruan tinggi pada Agustus 2021 mengalami peningkatan, yaitu masing-masing naik sebesar 2,59 persen poin dan 0,19 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Meningkatnya persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA ke atas disebabkan adanya kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan pekerja/karyawan. Semakin tinggi tingkat pendidikan memberikan gambaran semakin meningkatnya kualitas pekerja/karyawan dan diharapkan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Gambar 3.10. Persentase Pekerja/Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021 (persen)



Sumber: Sakernas Agustus 2021

Jika dilihat menurut tipe daerah, komposisi tingkat pendidikan pekerja/karyawan cukup berbeda. Pekerja/karyawan di daerah perkotaan pada Agustus 2021 didominasi mereka yang berpendidikan SLTA, yaitu mencapai 48,44 persen. Kontribusi terbanyak berikutnya pekerja/karyawan dengan pendidikan perguruan tinggi (29,57 persen) dan paling sedikit berpendidikan SLTP ke bawah (21,99 persen). Berbeda dengan pekerja/karyawan di daerah perdesaan paling banyak berpendidikan SLTP ke bawah (45,85 persen).

Terbanyak berikutnya pekerja/karyawan yang berpendidikan SLTA (35,87 persen) dan paling sedikit berpendidikan perguruan tinggi yang hanya mencapai 18,28 persen. Lebih baiknya tingkat pendidikan pekerja/karyawan di perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan karena keberadaan infrastruktur pendidikan dan kualifikasi pendidikan pekerja/karyawan yang dibutuhkan perusahaan di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan.

3.5. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan

Upah merupakan balas jasa terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan untuk proses produksi. Oleh karena itu, upah digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan, setiap perusahaan harus berusaha supaya upah terendahnya masih dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum pekerjanya. Jika upah yang ditetapkan berada dibawah ketentuan upah minimum, maka hal ini akan menyulitkan perusahaan karena perusahaan dianggap melanggar secara yuridis. Disamping itu juga akan menyebabkan turunnya motivasi kerja, disiplin, dan semangat kerja pekerja yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan.

Pekerja dan pengusaha merupakan pasangan yang saling mempengaruhi. Semakin ketatnya persaingan bisnis mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memberikan upah layak bagi pekerjanya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu bersaing dan salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas adalah upah. Jika sistem upah dirasakan adil dan kompetitif oleh pekerja, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik pekerja yang potensial, mempertahankannya, dan memotivasi agar lebih meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan

perusahaan mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif, unggul dalam persaingan, mampu meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya. Upah mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja pekerja, selanjutnya dengan kinerja pekerja yang baik pada gilirannya akan mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja/karyawan serta keluarganya, maka diperlukan berbagai kebijakan dalam penetapan tingkat upah/gaji pekerja/karyawan. Banyak faktor yang menentukan besarnya upah/gaji seorang pekerja/karyawan, antara lain lapangan usaha, tingkat pendidikan, jam kerja dan pengalaman kerja.

Tabel 3.6. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Sektor/Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (Rupiah)

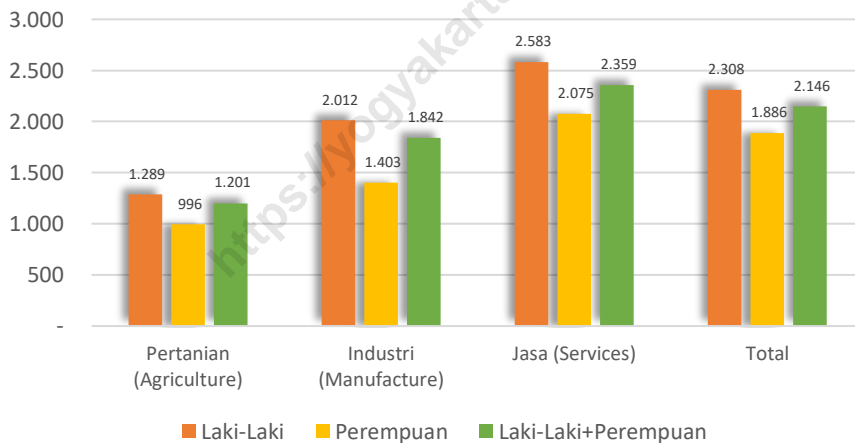
Lapangan Usaha	Agustus 2020			Agustus 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	1.236.725	928.200	1.127.853	1.288.715	995.633	1.201.293
M	1.992.197	1.389.247	1.832.137	2.011.579	1.402.574	1.841.686
S	2.752.394	1.981.252	2.394.482	2.583.351	2.075.420	2.358.828
Total	2.385.621	1.812.408	2.157.006	2.308.486	1.885.898	2.145.896

Sumber: Sakernas Agustus 2020 dan Agustus 2021

Tabel 3.6 menunjukkan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan sebulan menurut sektor/lapangan usaha utama selama 2 tahun terakhir. Secara umum rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 mencapai Rp 2.145.896. Jika dilihat menurut sektor/lapangan usaha, rata-rata upah/gaji tertinggi pada Agustus 2021 diterima oleh pekerja/karyawan di Sektor Jasa (S),

yaitu sekitar Rp. 2.358.828, diikuti oleh Sektor Industri (M) sebesar Rp. 1.841.686 dan terendah Sektor Pertanian (A) yang hanya mencapai Rp. 1.201.293. Pada Agustus 2021, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan mengalami penurunan sebesar Rp 11.110. Penurunan upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 dipicu oleh penurunan upah/gaji pada Sektor Jasa, yaitu turun Rp 35.654. Penurunan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 sebagai dampak pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 pada Bulan Juli-Agustus 2021, sehingga beberapa perusahaan melakukan penyesuaian dengan mengurangi jam kerja.

Gambar 3.11. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan Menurut Lapangan Usaha Utama di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021 (Ribu Rupiah)

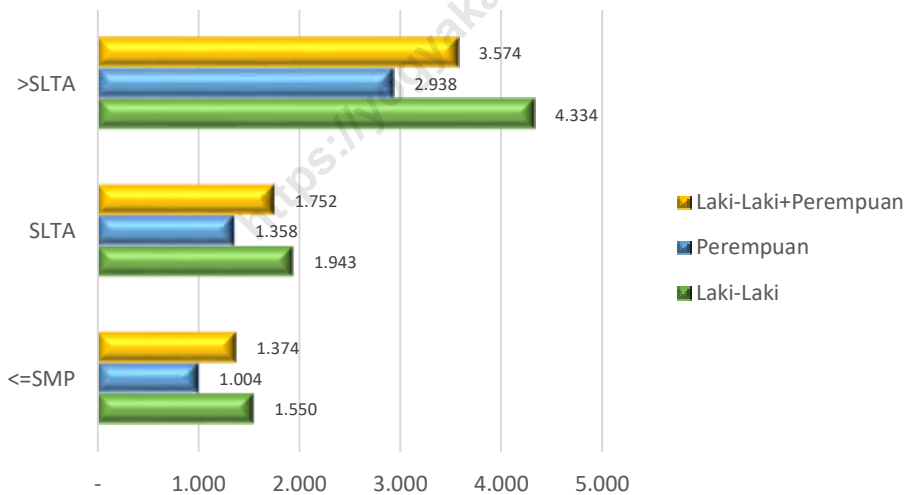


Sumber: Sakernas Agustus 2021

Pola serupa juga terjadi pada upah/gaji pekerja/karyawan menurut jenis kelamin. Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan tertinggi ada pada Sektor Jasa (S), diikuti Sektor Industri (M) dan terendah Sektor Pertanian (A). Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki selalu besar dibandingkan perempuan. Pada Agustus 2021, rata-rata

upah/gaji pekerja/karyawan perempuan sebesar Rp. 1.885.898 lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai Rp. 2.308.486 sebulan. Fenomena tingginya upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki di D.I. Yogyakarta dibandingkan dengan pekerja/karyawan perempuan terjadi di semua sektor. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan jenis pekerjaan yang dilakukan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dipengaruhi oleh sosial budaya bahwa perempuan mempunyai tugas pokok sebagai ibu rumah tangga. Jika terpaksa bekerja hanya sekedar membantu sehingga mungkin tidak mencurahkan tenaga/waktu sepenuhnya, khususnya di pekerjaan yang sifatnya informal.

Gambar 3.12. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2021 (Ribu Rupiah)



Sumber: Sakernas Agustus 2021

Faktor lain yang dapat menentukan besarnya upah/gaji adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan pekerja/karyawan. Berdasarkan Gambar 3.12 terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/keluarga maka semakin tinggi pula upah/gaji yang diterima. Rata-rata upah/gaji yang diterima

pekerja/karyawan yang memiliki pendidikan di bawah SLTA pada Agustus 2021 masih sangat rendah yaitu berada di bawah rata-rata upah/gaji dari pekerja secara umum, yaitu hanya mencapai Rp. 1.373.631.

Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan yang berpendidikan SLTA mencapai Rp 1.752.067 per bulan. Sedangkan pekerja/karyawan yang berpendidikan perguruan tinggi pada Agustus 2021 bahkan mencapai Rp 3.574.493 per bulan atau sekitar dua kali lipat dari rata-rata upah/gaji karyawan lulusan SLTA. Jika dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki berada di atas rata-rata yaitu sebesar Rp 2.308.486, sedangkan upah/gaji pekerja/karyawan perempuan sebesar 1.885.898. Pola serupa jika terjadi pada semua tingkatan pendidikan. Bahkan kalau dicermati semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan, maka semakin timpang besaran upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan. Perbedaan rata-rata upah pekerja/karyawan berpendidikan SMP ke bawah hanya sebesar Rp 546.167, sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi ketimpangan mencapai Rp 1.396.077.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan semakin tinggi pula rata-rata upah/gaji yang diterima. Disisi lain semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, maka semakin besar pula ketimpangan upah/gaji antara pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/karyawan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui pembangunan di bidang pendidikan. Secara khusus melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini

berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara dan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korelasi antara pendidikan dengan pendapatan lebih signifikan di negara yang sedang berkembang. Namun demikian juga perlu mendapatkan perhatian adanya kebijakan dalam mengurangi disparitas upah/gaji antara pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan.

3.6. Upah Minimum

Upah Minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh di suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Ketentuan penghitungan upah minimum selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu:

- a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali diterima bekerja.
- b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Kebijakan upah minimum untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas

pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.

Tabel 3.7. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di D.I. Yogyakarta, Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

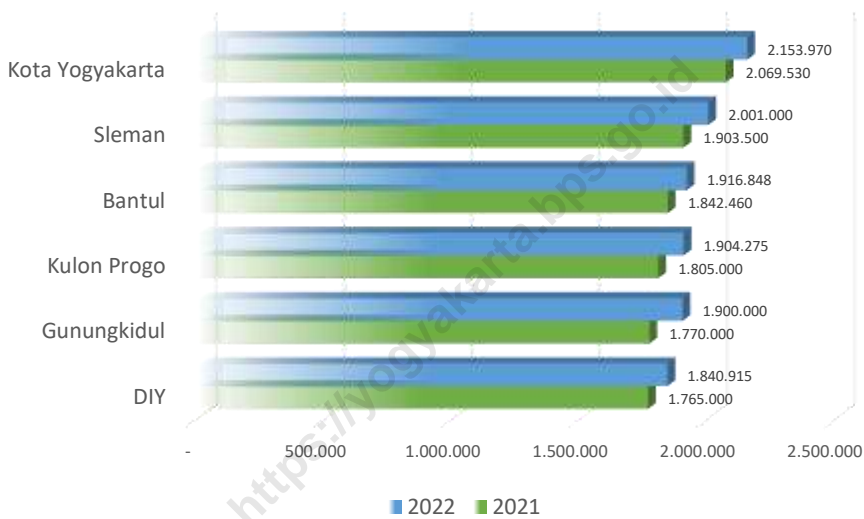
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gunungkidul	1.454.200	1.571.000	1.705.000	1.770.000	1.904.275
Kulon Progo	1.493.250	1.613.200	1.750.500	1.805.000	1.916.848
Bantul	1.572.150	1.649.800	1.790.500	1.842.460	1.900.000
Sleman	1.574.550	1.701.000	1.846.000	1.903.500	2.001.000
Yogyakarta	1.709.150	1.846.4000	2.004.000	2.069.530	2.153.970
D.I. Yogyakarta	1.454.154	1.570.923	1.704.608	1.765.000	1.840.915

Sumber: Disnakertrans D.I Yogyakarta

Data upah minimum yang disajikan dalam publikasi ini merupakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan melalui proses panjang. Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha. UMP D.I. Yogyakarta pertama kali ditetapkan pada tahun 2000 sebesar Rp. 194.500 per bulan. Perkembangan UMP setiap tahun selalu mengalami kenaikan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19 serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha, maka pada

tanggal 19 November 2021 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 372/KEP/2021 tentang penetapan besaran UMP D.I Yogyakarta Tahun 2022 dan pada tanggal yang sama Gubernur juga menetapkan besaran UMK Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 373/KEP/2021 tentang penetapan besaran UMK Tahun 2022.

Gambar 3.13. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di D.I. Yogyakarta, 2021 – 2022 (Rupiah)



Sumber: Disnakertrans DIY, 2021-2022

Mulai tahun 2013 kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta mempunyai UMK. UMP maupun UMK di D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 sudah mencapai di atas 1,5 juta rupiah. UMP D.I Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai Rp 1.840.915 atau naik 4,30 persen dibandingkan tahun 2021. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada kisaran antara 4,04 - 7,34 persen. Kenaikan UMK terbesar ada di Kabupaten Gunungkidul (7,34 persen) dan terendah di Kabupaten Bantul (4,04 persen). Tabel 3.7 menunjukkan bahwa urutan UMK dari yang terkecil sampai terbesar

selama 5 (lima) tahun tidak mengalami perubahan. UMK pada tahun 2022 tertinggi ada di Kota Yogyakarta, yaitu mencapai Rp 2.153.970. Tertinggi berikutnya diikuti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan paling sedikit ada di Kabupaten Gunungkidul.

Sementara itu secara nasional, UMP di Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel lampiran 30. Peringkat UMP D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan UMP tahun 2021. UMP D.I Yogyakarta pada tahun 2021 menempati peringkat terendah di Indonesia, sedangkan pada tahun 2022 sedikit mengalami perbaikan, yaitu meningkat satu tingkat menjadi terendah kedua. UMP tertinggi diraih oleh DKI Jakarta sebesar Rp. 4.641.854. Selanjutnya rata-rata UMP tahun 2022 di Indonesia sebesar Rp. 2.739.415. Rendahnya UMP di D.I. Yogyakarta merupakan implikasi dari rendahnya biaya hidup di daerah ini. Dengan argumen biaya tenaga kerja yang lebih rendah yang berdampak pada rendahnya biaya produksi menjadikan D.I. Yogyakarta sebagai tujuan investasi menarik bagi para pengusaha yang menanamkan modalnya di D.I. Yogyakarta.

3.7. Pasar Tenaga Kerja

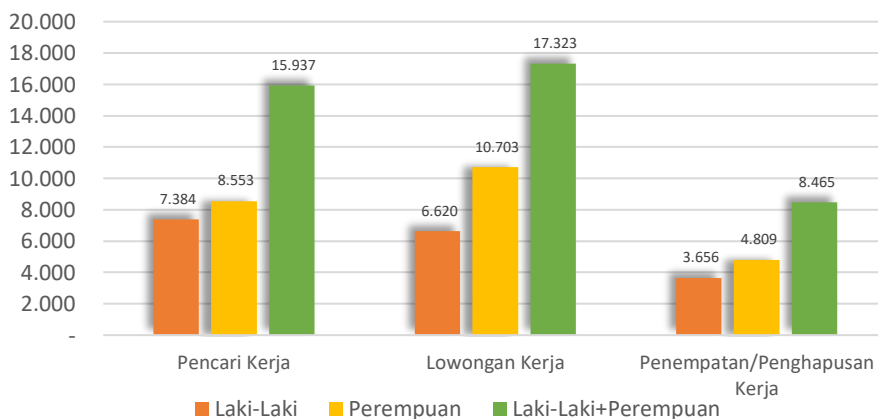
Luas wilayah dan distribusi penduduk di perkotaan merupakan penyebab timbulnya permasalahan ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta. Kelengkapan infrastruktur dan fasilitas wilayah perkotaan menjadi daya tarik bagi pencari kerja yang berasal dari perdesaan, sehingga kota menjadi semakin padat. Banyaknya penduduk di perkotaan ini dapat meningkatkan investasi, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan usaha dapat menciptakan atau menambah jumlah pengangguran. Sementara perdesaan memiliki potensi alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal dengan penduduk yang masih jarang.

Ketersediaan lapangan pekerjaan suatu wilayah berpengaruh terhadap penyebaran tenaga kerja. Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya alam dan manusia. Untuk mengatasi hal ini maka perlu upaya mempertemukan angkatan kerja yang mencari pekerjaan dengan pengusaha yang mempunyai lowongan kerja melalui suatu media yang disebut pasar tenaga kerja. Pasar Tenaga Kerja merupakan seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud adalah pencari kerja, pemberi kerja dan perantara yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan.

Pencari kerja merupakan setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Sedangkan pemberi kerja merupakan perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Selanjutnya perantara kerja merupakan media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja dan *headhunters* (pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, *headhunters* akan memperoleh persentase gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan, maka pasar tenaga kerja dirasakan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan. Dalam upaya menciptakan kondisi yang bersinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pemberi tenaga kerja maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu pencari kerja, pemberi kerja dan perantara. Manfaat adanya bursa tenaga kerja untuk membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran, membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja, dan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Data pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja (permintaan), dan penempatan kerja (pemenuhan) diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja. Metode pengumpulan data pasar tenaga kerja ini adalah berdasarkan pelaporan sehingga mungkin belum dapat menggambarkan sepenuhnya keadaan pasar tenaga kerja dan hanya digunakan sebagai gambaran kasar saja.

Gambar 3.14. Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2021 (orang)



Sumber: Disnakertrans DIY, 2021

Tabel 3.8. Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2020-2021 (orang)

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencari Kerja			
2020	6.895	6.936	13.831
2021	7.384	8.553	15.937
Lowongan Kerja			
2020	4.201	6.240	10.441
2021	6.620	10.703	17.323
Penempatan			
2020	3.288	4.421	7.709
2021	3.656	4.809	8.465

Sumber: Disnakertrans D.I. Yogyakarta, 2020 – 2021

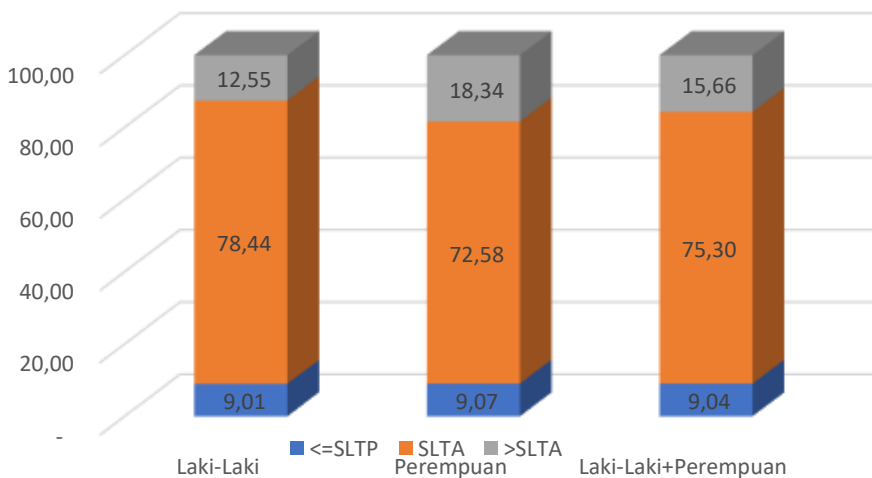
Tabel 3.8 memperlihatkan perbandingan antara pencari kerja terhadap lowongan kerja dan penempatan kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 15.937 orang pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 17.323 orang (108,70 persen). Jumlah lowongan kerja tersebut sebenarnya sudah cukup ideal untuk menyerap seluruh pencari kerja. Namun demikian pada kenyataannya pencari kerja yang berhasil ditempatkan hanya sebanyak 8.465 orang atau 53,12 persen dari total pencari kerja. Angka ini mengandung arti bahwa setiap 100 orang pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 yang berhasil ditempatkan ada sekitar 53 orang pencari kerja. Penempatan pencari kerja yang berhasil diterima ada di wilayah D.I Yogyakarta maupun luar D.I. Yogyakarta. Tidak seimbangya tingkat penyerapan pencari kerja dengan

lowongan kerja kemungkinan disebabkan karena kompetisi pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja di D.I Yogyakarta tidak hanya diikuti pencari kerja dari D.I Yogyakarta, akan tetapi juga pencari kerja dari luar D.I Yogyakarta.

Kondisi pasar tenaga kerja pada tahun 2021 jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah pencari kerja laki-laki di D.I Yogyakarta terdapat sebanyak 7.384 orang dengan jumlah lowongan kerjanya sebanyak 6.620 orang (sekitar 84,44 persen) dan berhasil ditempatkan sebanyak 3.656 orang (sekitar 49,51 persen). Sedangkan pencari kerja perempuan ada sebanyak 8.553 orang dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 10.703 (sekitar 125,14 persen) dan penempatan sebanyak 4.809 orang (sekitar 54,32 persen).

Dilihat menurut tingkat pendidikan, pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta pada tahun 2021 paling banyak berpendidikan SLTA, yaitu mencapai 75,30 persen. Terbanyak berikutnya berijazah perguruan tinggi yang mencapai 15,66 persen dan paling sedikit 9,04 persen berpendidikan SLTP ke bawah.

Gambar 3.15. Pencari Kerja yang Terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021 (persen)



Sumber: Disnakertrans D.I. Yogyakarta, diolah 2021

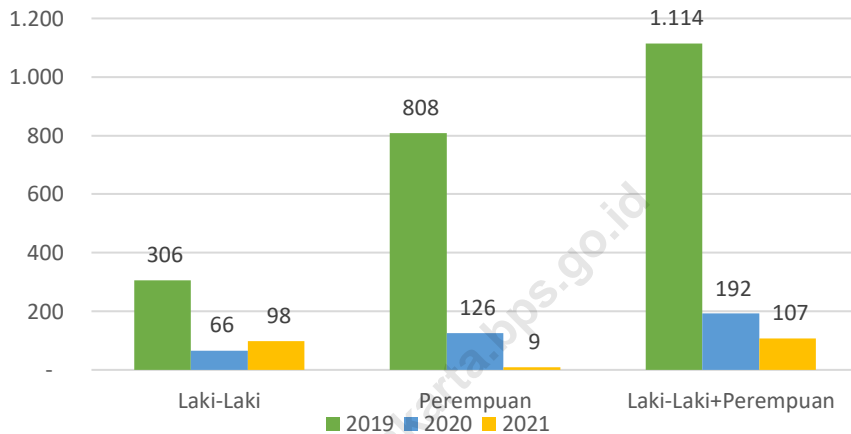
Pola serupa juga terjadi jika dilihat menurut jenis kelamin. Pencari kerja laki-laki maupun perempuan terbanyak berpendidikan SLTA, masing-masing mencapai 78,44 persen bagi laki-laki dan 72,58 persen bagi perempuan. Berikutnya pencari kerja berpendidikan perguruan tinggi, yaitu pencari kerja laki-laki mencapai 12,55 persen dan pencari kerja perempuan mencapai 18,34 persen. Sedangkan pencari kerja paling sedikit berpendidikan SLTP ke bawah.

Dalam upaya memberikan kesempatan kerja bagi pencari kerja, pemerintah terus berupaya membuka kesempatan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Tenaga kerja yang memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Gambar 3.16 menyajikan perkembangan data jumlah tenaga kerja yang diproses bekerja di luar negeri. Covid-19 sangat berdampak pada pengiriman TKI yang bekerja ke luar negeri. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan jumlah TKI yang signifikan. Menurunnya pengiriman jumlah TKI yang bekerja di luar negeri selain alasan larangan bepergian ke luar negeri, juga karena perusahaan pada umumnya melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja dengan cara mengurangi jumlah pekerja (termasuk TKI). Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-D.I Yogyakarta menunjukkan bahwa pada periode 2019-2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri terus mengalami penurunan. Sebelum pandemi Covid-19, jumlah TKI ada sebanyak 1.114 jiwa dan pada tahun 2020 berkurang sangat signifikan, yaitu menjadi 192 orang atau berkurang sebanyak 82,76 persen dibanding tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 turun kembali menjadi 107 orang atau turun 44,27 persen terhadap tahun 2020.

Pola yang sama juga terjadi jika dilihat menurut jenis kelamin. Jumlah TKI laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri selama pandemi Covid-

19 turun drastis dibandingkan sebelum pandemi. Namun demikian jumlah TKI laki-laki pada tahun 2021 sudah mulai menunjukkan sinyalemen positif, yaitu jumlahnya menjadi 98 orang atau naik 48,49 persen terhadap tahun 2020.

Gambar 3.16. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 2019-2021
(Orang)



Sumber: Disnaker Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta, 2021

Secara umum jumlah TKI perempuan yang bekerja di luar negeri lebih banyak dibandingkan TKI laki-laki. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja bagi perempuan di luar negeri lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. TKI perempuan pada tahun 2019 ada sebanyak 808 orang, sedangkan TKI laki-laki hanya mencapai 306 orang. Demikian pula pada tahun 2020, jumlah TKI perempuan mencapai 126 orang dan laki-laki hanya mencapai 98 orang. Namun tidak demikian dengan tahun 2021, jumlah TKI perempuan yang diberangkatkan ke luar negeri hanya 9 orang dan TKI laki-laki mencapai 98 orang.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, penyumbang TKI terbanyak tahun 2021 di D.I. Yogyakarta berasal dari Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 63

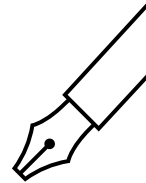
orang dengan rincian 57 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Selanjutnya TKI terbanyak berikutnya diikuti Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo yang sebelum pandemi merupakan kabupaten penyumbang TKI terbanyak ke luar negeri, namun pada tahun 2021 tidak ada satupun TKI yang diberangkatkan bekerja di luar negeri.

Tabel 3.9. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Asal Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (orang)

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	0	0	0
Bantul	4	0	4
Gunungkidul	2	1	3
Sleman	57	6	63
Yogyakarta	35	2	37
D.I. Yogyakarta	98	9	107

Sumber: Disnaker Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta, 2021

BAB 4



PENUTUP



<https://yogyakarta.bps.go.id>



4.1 Kesimpulan

Memasuki tahun 2021 kondisi perekonomian D.I Yogyakarta sudah mengarah perbaikan. Perekonomian D.I Yogyakarta triwulan I tahun 2021 dibanding triwulan I tahun 2020 (y-on-y) tumbuh 5,74 persen dan pada triwulan II tahun 2021 bahkan meningkat dua kali lipat, yaitu menjadi 11,88 persen. Sejak Juli 2021 kasus Covid-19 meningkat kembali dengan masuknya varian Delta. Pemerintah kembali mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan D.I Yogyakarta pada Juli-Agustus 2021 diberlakukan PPKM Darurat Level 4. Kebijakan ini berdampak pada perekonomian D.I Yogyakarta pada triwulan III tahun 2021 mengalami keterpurukan, yaitu perekonomian hanya mampu tumbuh 2,31 persen. Kondisi ekonomi yang kurang membaik secara langsung berpengaruh terhadap rendahnya penawaran tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan TPT pada Agustus 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu pada Agustus 2021 sebesar 4,56 persen atau turun 0,01 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Dapat juga dikatakan bahwa TTK pada Agustus 2021 naik 0,01 persen poin dibandingkan Agustus 2020 atau menjadi 95,44 persen.

Walaupun TPT Agustus 2021 relatif stabil, akan tetapi jumlah angkatan kerja D.I. Yogyakarta meningkat 4,79 persen dibandingkan Agustus 2020 atau naik menjadi 2,23 juta orang. TPAK di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 mencapai 73,52 persen atau meningkat 2,40 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Sejalan dengan hal tersebut, rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau *Employment to Population Ratio* (EPR) juga

meningkat, dari 67,87 persen pada Agustus 2020 menjadi 70,17 persen pada Agustus 2021. TPAK dan EPR penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuan, demikian juga TPAK dan EPR perdesaan lebih besar dibanding perkotaan.

Mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di D.I. Yogyakarta berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dan paling sedikit berstatus pekerja bebas pertanian. Persentase penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2021 mencapai 41,12 persen dan jika dibandingkan dengan Agustus 2020 naik 2,34 persen poin. Sementara itu penduduk bekerja yang berstatus pekerja bebas pertanian hanya mencapai 1,33 persen atau turun sebesar 0,37 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Sektor Jasa (S) pada Agustus 2020 dan Agustus 2021 merupakan sektor yang paling banyak menyerap pekerja/karyawan dengan kontribusi sebesar 64,34 persen. Terbanyak berikutnya diikuti Sektor Industri (M) sebesar 31,20 persen dan paling sedikit Sektor Pertanian (A) sebesar 4,46 persen. Dibandingkan Agustus 2020, Sektor Industri (M) pada Agustus 2021 mengalami peningkatan, yaitu 1,43 persen poin. Sedangkan Sektor Pertanian (A) maupun Sektor Jasa (S) pada Agustus 2021 mengalami penurunan, yaitu secara berurutan turun sebesar 1,08 persen poin dan 0,36 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2021 didominasi tingkat pendidikan SLTA ke atas sebanyak 73,02 persen atau hampir $\frac{3}{4}$ nya dari seluruh pekerja/karyawan penerima upah. Sedangkan sisanya sebanyak 26,98 persen berpendidikan SLTP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerja/karyawan di D.I Yogyakarta sudah cukup bagus sehingga diharapkan pekerja/karyawan memiliki kemampuan dan

keterampilan bekerja yang lebih baik dalam upaya untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Secara umum rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 mencapai Rp 2.145.896. Rata-rata upah/gaji tertinggi pada Agustus 2021 diterima oleh pekerja/karyawan di Sektor Jasa (S), yaitu sekitar Rp. 2.358.828, diikuti oleh Sektor Industri (M) sebesar Rp. 1.841.686 dan terendah Sektor Pertanian (A) yang hanya mencapai Rp. 1.201.293. Pada Agustus 2021, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan mengalami penurunan sebesar Rp 11.110. Penurunan upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 dipicu oleh penurunan upah/gaji pada Sektor Jasa, yaitu turun Rp 35.654. Penurunan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan pada Agustus 2021 sebagai dampak pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 pada Bulan Juli-Agustus 2021, sehingga beberapa perusahaan melakukan penyesuaian dengan mengurangi jam kerja.

Peringkat UMP D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan UMP tahun 2021. UMP D.I Yogyakarta tahun 2021 menempati peringkat terendah di Indonesia, sedangkan pada tahun 2022 meningkat satu tingkat menjadi terendah kedua, yaitu menjadi sebesar Rp. 1.840.915 atau mengalami kenaikan 4,30 persen. Upah Minimum Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta pada tahun 2022 mengalami kenaikan antara 4,04 - 7,34 persen, kenaikan terbesar ada di Kabupaten Gunungkidul (7,34 persen) dan terendah di Kabupaten Bantul (4,04 persen). UMK pada tahun 2022 tertinggi ada di Kota Yogyakarta, yaitu mencapai Rp 2.153.970. Tertinggi berikutnya diikuti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan paling sedikit ada di Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 15.937 orang pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 17.323 orang (108,70 persen).

Jumlah lowongan kerja tersebut sebenarnya sudah cukup ideal, akan tetapi pencari kerja yang berhasil ditempatkan hanya sebanyak 8.465 orang atau 53,12 persen dari total pencari kerja. Tidak seimbangnya tingkat penyerapan pencari kerja dengan lowongan kerja kemungkinan disebabkan karena kompetisi pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja di D.I Yogyakarta tidak hanya diikuti pencari kerja dari D.I Yogyakarta, akan tetapi juga pencari kerja dari luar D.I Yogyakarta.

Dalam upaya memberikan kesempatan kerja bagi pencari kerja, pemerintah terus berupaya membuka kesempatan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah TKI yang signifikan. Pada periode 2019-2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri terus mengalami penurunan. Sebelum pandemi Covid-19, jumlah TKI ada sebanyak 1.114 jiwa dan pada tahun 2020 berkurang sangat signifikan, yaitu menjadi 192 orang atau berkurang sebanyak 82,76 persen dibanding tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 turun kembali menjadi 107 orang atau turun 44,27 persen terhadap tahun 2020.

4.2. Saran

Peningkatan pengangguran dan kemiskinan berdampak pada penurunan kesejahteraan penduduk. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya sehingga jumlah pengangguran tidak semakin bertambah, diantaranya adalah:

- a. Efisiensi biaya produksi dengan meminimalkan pemangkasan jumlah tenaga kerja
- b. Meningkatkan semangat kreatif berusaha
- c. Memanfaatkan bantuan Pemerintah atau lembaga lain untuk kegiatan produktif.

Pendidikan pekerja/karyawan perempuan di D.I. Yogyakarta semakin baik. Namun demikian, jumlah perempuan yang berstatus sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar masih lebih banyak dibanding laki-laki, demikian juga untuk upah yang diterima pekerja/karyawan perempuan lebih rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja perempuan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendidikan dan pengalaman kerja di dunia usaha.
- b. Mengikuti pelatihan kerja yang meliputi kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan persyaratan pekerjaan sehingga dapat terserap di lapangan kerja yang tersedia dan menjadi lebih produktif.
- c. Pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dengan pengembangan pekerjaan umum.
- d. Meningkatkan penanaman modal dalam negeri untuk menciptakan atau menambah lapangan kerja.
- e. Penerapan Undang-undang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan agar pekerja/karyawan perempuan mendapatkan hak dan upah sesuai ketentuan yang ada.

Lampiran

<https://yogyakarta.go.id>

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas			
	Kulon Progo	169.987	180.581	350.568
	Bantul	409.451	421.516	830.967
	Gunungkidul	293.281	324.209	617.490
	Sleman	507.306	504.710	1.012.016
	Yogyakarta	175.272	189.476	364.748
	D.I. Yogyakarta	1.555.297	1.620.492	3.175.789
2.	Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	145.598	123.366	268.964
	Bantul	340.166	255.177	595.343
	Gunungkidul	249.858	219.343	469.201
	Sleman	413.941	325.381	739.322
	Yogyakarta	138.758	123.367	262.125
	D.I. Yogyakarta	1.288.321	1.046.634	2.334.955
3.	Bukan Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	24.389	57.215	81.604
	Bantul	69.285	166.339	235.624
	Gunungkidul	43.423	104.866	148.289
	Sleman	93.365	179.329	272.694
	Yogyakarta	36.514	66.109	102.623
	D.I. Yogyakarta	266.976	573.858	840.834

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2021

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas			
	Kulon Progo	107.699	242.869	350.568
	Bantul	769.213	61.754	830.967
	Gunungkidul	109.087	508.403	617.490
	Sleman	1.010.063	1.953	1.012.016
	Yogyakarta	364.748	-	364.748
	D.I. Yogyakarta	2.360.810	814.979	3.175.789
2.	Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	78.086	190.878	268.964
	Bantul	548.222	47.121	595.343
	Gunungkidul	73.763	395.438	469.201
	Sleman	737.821	1.501	739.322
	Yogyakarta	262.125	-	262.125
	D.I. Yogyakarta	1.700.017	634.938	2.334.955
3.	Bukan Angkatan Kerja			
	Kulon Progo	29.613	51.991	81.604
	Bantul	220.991	14.633	235.624
	Gunungkidul	35.324	112.965	148.289
	Sleman	272.242	452	272.694
	Yogyakarta	102.623	-	102.623
	D.I. Yogyakarta	660.793	180.041	840.834

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 3. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bekerja			
	Kulon Progo	139.730	119.314	259.044
	Bantul	323.064	248.204	571.268
	Gunungkidul	243.017	215.869	458.886
	Sleman	392.033	309.090	701.123
	Yogyakarta	122.501	115.701	238.202
	D.I. Yogyakarta	1.220.345	1.008.178	2.228.523
2.	Pengangguran			
	Kulon Progo	5.868	4.052	9.920
	Bantul	17.102	6.973	24.075
	Gunungkidul	6.841	3.474	10.315
	Sleman	21.908	16.291	38.199
	Yogyakarta	16.257	7.666	23.923
	D.I. Yogyakarta	67.976	38.456	106.432
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	Kulon Progo	4,03	3,28	3,69
	Bantul	5,03	2,73	4,04
	Gunungkidul	2,74	1,58	2,20
	Sleman	5,29	5,01	5,17
	Yogyakarta	11,72	6,21	9,13
	D.I. Yogyakarta	5,28	3,67	4,56

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 4. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, 2021

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bekerja			
	Kulon Progo	73.953	185.091	259.044
	Bantul	525.499	45.769	571.268
	Gunungkidul	70.263	388.623	458.886
	Sleman	699.672	1.451	701.123
	Yogyakarta	238.202	-	238.202
	D.I. Yogyakarta	1.607.589	620.934	2.228.523
2.	Pengangguran			
	Kulon Progo	4.133	5.787	9.920
	Bantul	22.723	1.352	24.075
	Gunungkidul	3.500	6.815	10.315
	Sleman	38.149	50	38.199
	Yogyakarta	23.923	-	23.923
	D.I. Yogyakarta	92.428	14.004	106.432
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	Kulon Progo	5,29	3,03	3,69
	Bantul	4,14	2,87	4,04
	Gunungkidul	4,74	1,72	2,20
	Sleman	5,17	3,33	5,17
	Yogyakarta	9,13	-	9,13
	D.I. Yogyakarta	5,44	2,21	4,56

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 5. TTK dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)			
	Kulon Progo	95,97	96,72	96,31
	Bantul	94,97	97,27	95,96
	Gunungkidul	97,26	98,42	97,80
	Sleman	94,71	94,99	94,83
	Yogyakarta	88,28	93,79	90,87
	D.I. Yogyakarta	94,72	96,33	95,44
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			
	Kulon Progo	85,65	68,32	76,72
	Bantul	83,08	60,54	71,64
	Gunungkidul	85,19	67,65	75,99
	Sleman	81,60	64,47	73,05
	Yogyakarta	79,17	65,11	71,86
	D.I. Yogyakarta	82,83	64,59	73,52

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 6. TTK dan TPAK Menurut Kabupaten/Kota dan dan Tipe Daerah, 2021

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)			
	Kulon Progo	94,71	96,97	96,31
	Bantul	95,86	97,13	95,96
	Gunungkidul	95,26	98,28	97,80
	Sleman	94,83	96,67	94,83
	Yogyakarta	90,87	-	90,87
	D.I. Yogyakarta	94,56	97,79	95,44
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			
	Kulon Progo	72,50	78,59	76,72
	Bantul	71,27	76,30	71,64
	Gunungkidul	67,62	77,78	75,99
	Sleman	73,05	76,86	73,05
	Yogyakarta	71,86	-	71,86
	D.I. Yogyakarta	72,01	77,91	73,52

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 7. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Sektor/Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2021

No	Sektor/Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kulon Progo	40.748	28.130	68.878
	a. Sektor Pertanian	40.392	37.513	77.905
	b. Sektor Industri	58.590	53.671	112.261
	c. Sektor Jasa	139.730	119.314	259.044
2.	Bantul	50.348	29.381	79.729
	a. Sektor Pertanian	88.774	61.806	150.580
	b. Sektor Industri	183.942	157.017	340.959
	c. Sektor Jasa	323.064	248.204	571.268
3.	Gunungkidul	81.021	83.758	164.779
	a. Sektor Pertanian	85.884	54.161	140.045
	b. Sektor Industri	76.112	77.950	154.062
	c. Sektor Jasa	243.017	215.869	458.886
4.	Sleman	56.400	32.482	88.882
	a. Sektor Pertanian	95.105	58.064	153.169
	b. Sektor Industri	240.528	218.544	459.072
	c. Sektor Jasa	392.033	309.090	701.123
5.	Kota Yogyakarta	2.608	1.191	3.799
	a. Sektor Pertanian	23.593	19.970	43.563
	b. Sektor Industri	96.300	94.540	190.840
	c. Sektor Jasa	122.501	115.701	238.202

Sumber: Sakernas Agustus 2021

**Lampiran 8. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota,
Sektor/Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2021**

No	Sektor/Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kulon Progo	15.506	53.372	68.878
	a. Sektor Pertanian	20.203	57.702	77.905
	b. Sektor Industri	38.244	74.017	112.261
	c. Sektor Jasa	73.953	185.091	259.044
2.	Bantul	68.711	11.018	79.729
	a. Sektor Pertanian	129.259	21.321	150.580
	b. Sektor Industri	327.529	13.430	340.959
	c. Sektor Jasa	525.499	45.769	571.268
3.	Gunungkidul	11.969	152.810	164.779
	a. Sektor Pertanian	17.559	122.486	140.045
	b. Sektor Industri	40.735	113.327	154.062
	c. Sektor Jasa	70.263	388.623	458.886
4.	Sleman	88.517	365	88.882
	a. Sektor Pertanian	152.784	385	153.169
	b. Sektor Industri	458.371	701	459.072
	c. Sektor Jasa	699.672	1.451	701.123
5.	Kota Yogyakarta	3.799	-	3.799
	a. Sektor Pertanian	43.563	-	43.563
	b. Sektor Industri	190.840	-	190.840
	c. Sektor Jasa	238.202	-	238.202

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 9. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2021

No	Kabupaten/Kota	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Kulon Progo	58.089	64.914	16.727	139.730
	Bantul	120.735	153.521	48.808	323.064
	Gunungkidul	163.238	61.348	18.431	243.017
	Sleman	102.927	196.509	92.597	392.033
	Yogyakarta	29.934	65.073	27.494	122.501
	D.I. Yogyakarta	474.923	541.365	204.057	1.220.345
2.	Perempuan				
	Kulon Progo	58.038	39.606	21.670	119.314
	Bantul	99.911	87.359	60.934	248.204
	Gunungkidul	153.608	43.497	18.764	215.869
	Sleman	93.914	131.860	83.316	309.090
	Yogyakarta	37.972	48.062	29.667	115.701
	D.I. Yogyakarta	443.443	350.384	214.351	1.008.178
3.	Laki-laki + Perempuan				
	Kulon Progo	116.127	104.520	38.397	259.044
	Bantul	220.646	240.880	109.742	571.268
	Gunungkidul	316.846	104.845	37.195	458.886
	Sleman	196.841	328.369	175.913	701.123
	Yogyakarta	67.906	113.135	57.161	238.202
	D.I. Yogyakarta	918.366	891.749	418.408	2.228.523

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 10. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2021

No	Kabupaten/Kota	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Kulon Progo	27.721	33.487	12.745	73.953
	Bantul	190.556	228.721	106.222	525.499
	Gunungkidul	32.209	25.963	12.091	70.263
	Sleman	196.395	327.719	175.558	699.672
	Yogyakarta	67.906	113.135	57.161	238.202
	D.I. Yogyakarta	514.787	729.025	363.777	1.607.589
2.	Perdesaan				
	Kulon Progo	88.406	71.033	25.652	185.091
	Bantul	30.090	12.159	3.520	45.769
	Gunungkidul	284.637	78.882	25.104	388.623
	Sleman	446	650	355	1.451
	Yogyakarta	-	-	-	-
	D.I. Yogyakarta	403.579	162.724	54.631	620.934
3.	Perkotaan + Perdesaan				
	Kulon Progo	116.127	104.520	38.397	259.044
	Bantul	220.646	240.880	109.742	571.268
	Gunungkidul	316.846	104.845	37.195	458.886
	Sleman	196.841	328.369	175.913	701.123
	Yogyakarta	67.906	113.135	57.161	238.202
	D.I. Yogyakarta	918.366	891.749	418.408	2.228.523

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor/Lapangan Usaha, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Jenis Kelamin, 2021

No	Sektor/ Lapangan Usaha	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Pertanian	156.508	62.316	12.301	231.125
	Industri	168.646	139.875	25.227	333.748
	Jasa	149.769	339.174	166.529	655.472
	Jumlah	474.923	541.365	204.057	1.220.345
2.	Perempuan				
	Pertanian	139.466	31.025	4.451	174.942
	Industri	115.760	95.099	20.655	231.514
	Jasa	188.217	224.260	189.245	601.722
	Jumlah	443.443	350.384	214.351	1.008.178
3.	Laki-laki + Perempuan				
	Pertanian	295.974	93.341	16.752	406.067
	Industri	284.406	234.974	45.882	565.262
	Jasa	337.986	563.434	355.774	1.257.194
	Jumlah	918.366	891.749	418.408	2.228.523

Sumber: Sakernas Agustus 2021

**Lampiran 12. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor/Lapangan Usaha,
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah,
2021**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	≤ SLTP	SLTA	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Pertanian	114.954	61.361	12.187	188.502
	Industri	138.667	182.019	42.682	363.368
	Jasa	261.166	485.645	308.908	1.055.719
	Jumlah	514.787	729.025	363.777	1.607.589
2.	Perdesaan				
	Pertanian	181.020	31.980	4.565	217.565
	Industri	145.739	52.955	3.200	201.894
	Jasa	76.820	77.789	46.866	201.475
	Jumlah	403.579	162.724	54.631	620.934
3.	Perkotaan + Perdesaan				
	Pertanian	295.974	93.341	16.752	406.067
	Industri	284.406	234.974	45.882	565.262
	Jasa	337.986	563.434	355.774	1.257.194
	Jumlah	918.366	891.749	418.408	2.228.523

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	17.037	23.997	41.034
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	34.845	20.231	55.076
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5.172	1.992	7.164
4.	Buruh/karyawan/pegawai	51.485	37.597	89.082
5.	Pekerja bebas di pertanian	4.567	2.411	6.978
6.	Pekerja bebas di non pertanian	18.521	3.297	21.818
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	8.103	29.789	37.892
Jumlah		139.730	119.314	259.044

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 14. Jumlah Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Kulon Progo, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	11.646	29.388	41.034
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	13.529	41.547	55.076
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1.251	5.913	7.164
4.	Buruh/karyawan/pegawai	32.470	56.612	89.082
5.	Pekerja bebas di pertanian	2.960	4.018	6.978
6.	Pekerja bebas di non pertanian	5.113	16.705	21.818
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	6.984	30.908	37.892
Jumlah		73.953	185.091	259.044

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 15. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	59.492	50.902	110.394
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	42.610	36.297	78.907
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	20.335	6.269	26.604
4.	Buruh/karyawan/pegawai	155.071	108.093	263.164
5.	Pekerja bebas di pertanian	2.633	2.374	5.007
6.	Pekerja bebas di non pertanian	26.013	1.393	27.406
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	16.910	42.876	59.786
	Jumlah	323.064	248.204	571.268

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 16. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Bantul, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	100.434	9.960	110.394
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	72.242	6.665	78.907
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	24.035	2.569	26.604
4.	Buruh/karyawan/pegawai	248.143	15.021	263.164
5.	Pekerja bebas di pertanian	5.007	-	5.007
6.	Pekerja bebas di non pertanian	22.763	4.643	27.406
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	52.875	6.911	59.786
Jumlah		525.499	45.769	571.268

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 17. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	41.257	39.959	81.216
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	66.192	44.177	110.369
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4.705	3.579	8.284
4.	Buruh/karyawan/pegawai	68.058	46.087	114.145
5.	Pekerja bebas di pertanian	3.073	2.187	5.260
6.	Pekerja bebas di non pertanian	38.116	2.070	40.186
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	21.616	77.810	99.426
	Jumlah	243.017	215.869	458.886

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 18. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	15.466	65.750	81.216
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	9.793	100.576	110.369
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1.969	6.315	8.284
4.	Buruh/karyawan/pegawai	29.501	84.644	114.145
5.	Pekerja bebas di pertanian	-	5.260	5.260
6.	Pekerja bebas di non pertanian	4.846	35.340	40.186
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	8.688	90.738	99.426
Jumlah		70.263	388.623	458.886

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 19. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	83.336	58.487	141.823
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	44.179	42.434	86.613
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	15.385	8.064	23.449
4.	Buruh/karyawan/pegawai	192.863	146.749	339.612
5.	Pekerja bebas di pertanian	7.635	4.697	12.332
6.	Pekerja bebas di non pertanian	23.546	673	24.219
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	25.089	47.986	73.075
Jumlah		392.033	309.090	701.123

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 20. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kabupaten Sleman, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	141.555	268	141.823
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	86.407	206	86.613
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	23.443	6	23.449
4.	Buruh/karyawan/pegawai	338.917	695	339.612
5.	Pekerja bebas di pertanian	12.302	30	12.332
6.	Pekerja bebas di non pertanian	24.174	45	24.219
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	72.874	201	73.075
Jumlah		699.672	1.451	701.123

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 21. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	28.478	24.357	52.835
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	10.507	16.127	26.634
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	8.693	4.427	13.120
4.	Buruh/karyawan/pegawai	58.853	51.439	110.292
5.	Pekerja bebas di pertanian	-	-	-
6.	Pekerja bebas di non pertanian	5.718	1.258	6.976
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	10.252	18.093	28.345
Jumlah		122.501	115.701	238.202

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 22. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Kota Yogyakarta, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	52.835	-	52.835
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	26.634	-	26.634
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	13.120	-	13.120
4.	Buruh/karyawan/pegawai	110.292	-	110.292
5.	Pekerja bebas di pertanian	-	-	-
6.	Pekerja bebas di non pertanian	6.976	-	6.976
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	28.345	-	28.345
Jumlah		238.202	-	238.202

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 23. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	229.600	197.702	427.302
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	198.333	159.266	357.599
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	54.290	24.331	78.621
4.	Buruh/karyawan/pegawai	526.330	389.965	916.295
5.	Pekerja bebas di pertanian	17.908	11.669	29.577
6.	Pekerja bebas di non pertanian	111.914	8.691	120.605
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	81.970	216.554	298.524
Jumlah		1.220.345	1.008.178	2.228.523

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 24. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berusaha sendiri	321.936	105.366	427.302
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	208.605	148.994	357.599
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	63.818	14.803	78.621
4.	Buruh/karyawan/pegawai	759.323	156.972	916.295
5.	Pekerja bebas di pertanian	20.269	9.308	29.577
6.	Pekerja bebas di non pertanian	63.872	56.733	120.605
7.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	169.766	128.758	298.524
Jumlah		1.607.589	620.934	2.228.523

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 25. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Berusaha Sendiri	94.643	99.908	35.049	229.600
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	125.103	58.665	14.565	198.333
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	20.198	20.658	13.434	54.290
	Buruh/Karyawan/Pegawai	103.603	290.758	131.969	526.330
	Pekerja Bebas di Pertanian	14.031	3.504	373	17.908
	Pekerja Bebas di Non pertanian	77.294	34.620	-	111.914
	Pekerja keluarga/tak dibayar	40.051	33.252	8.667	81.970
	Jumlah	474.923	541.365	204.057	1.220.345
2.	Perempuan				
	Berusaha Sendiri	98.407	76.629	22.666	197.702
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	100.422	47.039	11.805	159.266
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	6.448	10.238	7.645	24.331
	Buruh/Karyawan/Pegawai	78.136	154.198	157.631	389.965
	Pekerja Bebas di Pertanian	8.740	2.929	-	11.669
	Pekerja Bebas di Non pertanian	5.916	2.534	241	8.691
	Pekerja keluarga/tak dibayar	145.374	56.817	14.363	216.554
	Jumlah	443.443	350.384	214.351	1.008.178

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 26. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Berusaha Sendiri	124.112	143.660	54.164	321.936
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	105.964	81.240	21.401	208.605
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	17.672	27.347	18.799	63.818
	Buruh/Karyawan/Pegawai	130.469	380.027	248.827	759.323
	Pekerja Bebas di Pertanian	15.489	4.407	373	20.269
	Pekerja Bebas di Non pertanian	39.509	24.122	241	63.872
	Pekerja keluarga/tak dibayar	81.572	68.222	19.972	169.766
	Jumlah	514.787	729.025	363.777	1.607.589
2.	Pedesaan				
	Berusaha Sendiri	68.938	32.877	3.551	105.366
	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	119.561	24.464	4.969	148.994
	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	8.974	3.549	2.280	14.803
	Buruh/Karyawan/Pegawai	51.270	64.929	40.773	156.972
	Pekerja Bebas di Pertanian	7.282	2.026	-	9.308
	Pekerja Bebas di Non pertanian	43.701	13.032	-	56.733
	Pekerja keluarga/tak dibayar	103.853	21.847	3.058	128.758
	Jumlah	403.579	162.724	54.631	620.934

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 27. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Berusaha Sendiri	193.050	176.537	57.715	427.302
2.	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	225.525	105.704	26.370	357.599
3.	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	26.646	30.896	21.079	78.621
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	181.739	444.956	289.600	916.295
5.	Pekerja Bebas di Pertanian	22.771	6.433	373	29.577
6.	Pekerja Bebas di Non pertanian	83.210	37.154	241	120.605
7.	Pekerja keluarga/tak dibayar	185.425	90.069	23.030	298.524
Jumlah		918.366	891.749	418.408	2.228.523

Sumber: Sakernas Agustus 2021

**Lampiran 28. Jumlah Pekerja/Karyawan Menurut Sektor Usaha,
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2021**

No	Sektor Usaha	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laki-laki				
	Pertanian	23.345	9.432	560	33.337
	Industri	115.448	107.830	16.667	239.945
	Jasa	56.135	211.620	115.115	382.870
	Jumlah	194.928	328.882	132.342	656.152
2.	Perempuan				
	Pertanian	9.947	3.454	770	14.171
	Industri	30.473	52.258	10.104	92.835
	Jasa	52.372	103.949	146.998	303.319
	Jumlah	92.792	159.661	157.872	410.325
3.	Laki-laki + Perempuan				
	Pertanian	33.292	12.886	1.330	47.508
	Industri	145.921	160.088	26.771	332.780
	Jasa	108.507	315.569	262.113	686.189
	Jumlah	287.720	488.543	290.214	1.066.477

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 29. Jumlah Pekerja/Karyawan Menurut Sektor Usaha, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2021

No	Sektor Usaha	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		≤ SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perkotaan				
	Pertanian	23.331	9.224	840	33.395
	Industri	83.394	126.321	25.423	235.138
	Jasa	78.742	273.011	223.178	574.931
	Jumlah	185.467	408.556	249.441	843.464
2.	Pedesaan				
	Pertanian	9.961	3.662	490	14.113
	Industri	62.527	33.767	1.348	97.642
	Jasa	29.765	42.558	38.935	111.258
	Jumlah	102.253	79.987	40.773	223.013
3.	Perkotaan + Pedesaan				
	Pertanian	33.292	12.886	1.330	47.508
	Industri	145.921	160.088	26.771	332.780
	Jasa	108.507	315.569	262.113	686.189
	Jumlah	287.720	488.543	290.214	1.066.477

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lampiran 30. Upah Minimum Provinsi Menurut Provinsi, 2021-2022

No	Provinsi	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DKI Jakarta	4.416.186	4.641.854
2.	Papua	3.516.700	3.561.932
3.	Kalimantan Utara	3.000.804	3.310.723
4.	Sulawesi Utara	3.310.723	3.310.723
5.	Bangka Belitung	3.230.023	3.264.884
6.	Papua Barat	3.134.600	3.200.000
7.	NAD	3.165.031	3.166.460
8.	Sulawesi Selatan	3.165.876	3.165.876
9.	Kepulauan Riau	3.005.460	3.144.466
10.	Sumatera Selatan	3.043.111	3.144.446
11.	Kalimantan Timur	2.981.378	3.014.497
12.	Riau	2.888.564	2.938.564
13.	Kalimantan Tengah	2.903.144	2.922.516
14.	Kalimantan Selatan	2.877.448	2.906.473
15.	Maluku Utara	2.721.530	2.862.231
16.	Gorontalo	2.788.826	2.800.580
17.	Sulawesi Tenggara	2.552.014	2.710.595
18.	Sulawesi Barat	2.678.863	2.678.863
19.	Jambi	2.630.162	2.649.034
20.	Maluku	2.604.960	2.619.312

No	Provinsi	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Sumatera Utara	2.499.423	2.522.609
22.	Bali	2.494.000	2.516.971
23.	Sumatera Barat	2.484.041	2.512.539
24.	Banten	2.460.996	2.501.203
25.	Lampung	2.432.001	2.440.486
26.	Kalimantan Barat	2.399.698	2.434.328
27.	Sulawesi Tengah	2.303.711	2.390.739
28.	Bengkulu	2.215.000	2.238.094
29.	NTB	2.183.883	2.207.212
30.	NTT	1.950.000	1.975.000
31.	Jawa Timur	1.868.777	1.891.567
32.	Jawa Barat	1.810.351	1.841.487
33.	D.I. Yogyakarta	1.765.000	1.840.915
34.	Jawa Tengah	1.798.979	1.812.935
	Rata-rata	2.684.743	2.739.415

Sumber: *kompas.com-02/12/2021*

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2021. Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- _____. 2021. Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2021. BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- _____. 2021. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2021. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2021. Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2021. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2021. Analisis Isu Terkini 2021. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2021. Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2021. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bramasta, Dandy Bayu. 2021. Daftar Lengkap UMP 2022 di 34 Provinsi. <https://www.kompas.com>. Diakses 2 Desember 2021.
- Idris, Muhammad. 2021. UMP Yogyakarta 2022: Dulu Termurah se-Indonesia, Kini Salip Jateng. <https://money.kompas.com>. Diakses 25 November 2021.
- Pemda D.I Yogyakarta. 2021. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 372/KEP/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Yogyakarta: Biro Hukum Pemda D.I Yogyakarta
- Pemda D.I Yogyakarta. 2021. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022. Yogyakarta: Biro Hukum Pemda D.I Yogyakarta

Susanto, Heri.2021. PPKM Darurat Berlaku di Seluruh Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. <https://news.detik.com>. Diakses 1 Juli 2021.

Widiyanto, Danar.2021. Selama PPKM Darurat, Begini Kondisi Ketenagakerjaan di D.I Yogyakarta. <https://www.krjogja.com>.Diakses 15 Juli 2021

<https://yogyakarta.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan - Bantul
Telp. (0274) 4342234 - Hunting., Fax. (0274) 4342230
E-mail: bps3400@bps.go.id, Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>

ISSN: 2460-3171



9 772460 317004